Juni 2022

aid environment

Bentang alam orang utan yang terancam

Peran hutan tanaman industri dalam perlindungan habitat hutan

Bentang alam orang utan yang terancam: Peran hutan tanaman industri dalam perlindungan habitat hutan

Laporan ini merupakan bagian dari proyek
'Corporate Transformation in Indonesia's Pulp & Paper Sector' atau
Transformasi Korporat dalam Sektor Pulp dan Kertas Indonesia

Laporan oleh
Aidenvironment

Juni 2022

Didukung oleh:
Good Energies Foundation
www.goodenergies.org

Penulis:
Christopher Wiggs, Aidenvironment
Jack Cunningham, Aidenvironment

Dengan kontribusi dari:
Monalisa Pasaribu
Okita Miraningrum
Sri Wahyuni
M. Haikal Sanjaya
Marco Tulio Garcia
Albert ten Kate
— semua dari Aidenvironment

Terima kasih kepada:
Dr Gail Campbell-Smith
Dr Tsuyoshi Kato, PT Mayangkara Tanaman Industri

Desain:
Grace Cunningham
www.linkedin.com/in/gracecunninghamdesign/

Aidenvironment
Barentszplein 7
1013 NJ Amsterdam
Belanda
+ 31 (0)20 686 81 11

www.aidenvironment.org
info@aidenvironment.org

Aidenvironment terdaftar di Kamar Dagang Amsterdam di Belanda dengan nomor 41208024

Ringkasan eksekutif

Semua spesies orang utan berstatus terancam kritis. Taman nasional dan kawasan lindung lainnya di Indonesia sudah lama menjadi fokus perhatian dalam kegiatan konservasi, dan saat ini kawasan tersebut masih mempunyai beberapa populasi orang utan yang paling besar. Namun demikian, dari 14.110.153 hektar (ha) habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di Indonesia, baru 3.456.191 ha (24%) saja yang terdapat dalam kawasan lindung. Sedangkan hampir dua kali luas tersebut, atau 6.219.661 ha (44%), terdapat di beberapa areal konsesi perkebunan kelapa sawit, pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri (HTI).

Aidenvironment memiliki basis data yang cukup ekstensif mengenai areal konsesi tersebut, sehingga dengan cara menumpangtindihkan basis data dengan habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa, maka kami berhasil mengidentifikasikan 10 konsesi perkebunan kelapa sawit, penebangan kayu dan HTI di peringkat atas dengan paling banyak habitat orang utan yang masih tersisa. Di antaranya, 4.757.727 ha (34%) terdapat di beberapa areal konsesi penebangan tebang pilih, 563.282 ha (4%) di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, dan 898.652 ha (6%) di areal konsesi HTI.

Sektor perkelapasawitan telah mengalami transformasi selama beberapa tahun terakhir dengan diterapkannya kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE). Kegiatan konservasi hutan, dan proyek yang ditujukan untuk melestarikan dan memulihkan kawasan hutan semakin digalakkan. Sektor penebangan kayu diatur oleh aturan tegas yang menetapkan volume kayu yang dapat dipungut dan luas tutupan hutan yang harus dipertahankan. Sebaliknya, pembukaan vegetasi asli masih diperkenankan di areal konsesi HTI yang umumnya lebih luas daripada areal perkebunan kelapa sawit, dan sektor HTI beroperasi dengan tingkat transparansi yang jauh lebih rendah dibanding sektor perkelapasawitan. Oleh karena itu, di banyak unit habitat orang utan, justru perusahaan HTI yang menjadi pemangku kepentingan utama.

Tiga areal konsesi HTI dengan luas hutan terbesar yang menjadi habitat orang utan di Indonesia adalah: PT Mayawana Persada di unit habitat Mendawak di bentang alam Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (68.776 ha); PT Industrial Forest Plantation di unit habitat Sungai Murui Hulu di bentang alam Kahayan-Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah (51.026 ha); dan PT Taiyoung Engreen di unit habitat Rungan Timur di bentang alam Sungai Rungan (41.609 ha). Ketiga perusahaan tersebut juga termasuk di antara pelaku deforestasi terbesar di sektor HTI. Dari tahun 2018 sampai 2021, PT Mayawana Persada membuka 8.852 ha hutan, PT Industrial Forest Plantation membuka 9.673 ha, dan PT Taiyoung Engreen membuka 3.510 ha.

Agar orang utan dapat bertahan hidup di luar kawasan lindung, maka perusahaan pemilik konsesi harus menerapkan program konservasi hutan, baik di dalam areal konsesinya maupun secara lebih luas di bentang alam yang dijadikan wilayah operasionalnya. Untuk memperlihatkan betapa penting dan rumitnya hal tersebut, dalam laporan ini Aidenvironment menyelidiki bentang alam Kubu Raya, Kahayan-Kapuas dan Sungai Rungan. Kami menyampaikan informasi mengenai kepemilikan konsesi kunci di masing-masing bentang alam tersebut serta luasnya habitat orang utan yang masih ada saat ini, dan menganjurkan berbagai intervensi konservasi yang dapat dilakukan.

‘Namun, dari 14.110.153 hektar (ha) habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di Indonesia, baru 3.456.191 ha (24%) saja yang terdapat dalam kawasan lindung.’

Deforestasi di
PT Mayawana Persada
Februari 2021
© Aidenvironment

Daftar isi

Ringkasan eksekutif p. 4

BAB SATU

Pendahuluan

Sebaran orang utan p. 8
Konversi hutan menjadi ancaman bagi orang utan p. 9
Upaya konservasi terfokus pada kawasan lindung p. 9
Konsesi perusahaan menjadi kunci untuk masa depan orang utan p. 10
Intervensi perusahaan di bentang alam berhutan yang merupakan habitat orang utan p. 11
Menghubungkan Taman Nasional Gunung Palung dengan Sungai Putri p. 12
Kisah peringatan: Kasus Taman Nasional Tanjung Puting p. 14

BAB DUA

Habitat orang utan di areal konsesi perusahaan

Mengidentifikasi habitat orang utan di areal konsesi p. 17
Konsesi kunci di bentang alam berhutan p. 18
Kinerja keberlanjutan sektor HTI tertinggal oleh sektor perkelapasawitan dan penebangan kayu p. 21
Terdapat indikasi kemajuan, namun deforestasi tetap terjadi p. 22
Konsesi HTI menjadi kunci dalam konservasi orang utan p. 22

BAB TIGA

Bentang alam

Bentang alam Sungai Rungan p. 24
Bentang alam Kahayan-Kapuas p. 30
Bentang alam Kubu Raya p. 38

Referensi p. 48

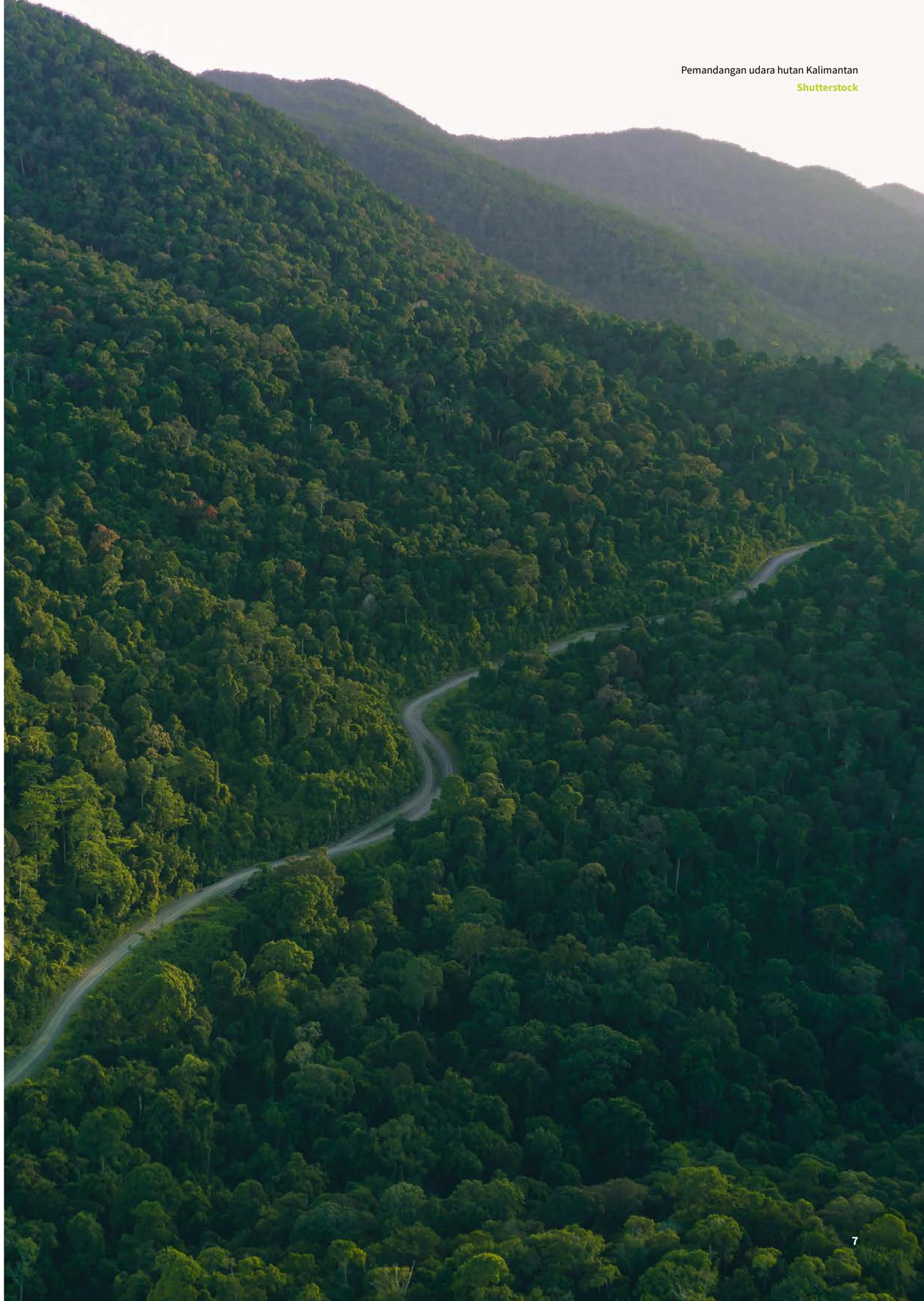

Pemandangan udara hutan Kalimantan
Shutterstock

Pendahuluan

Sebaran orang utan

Orang utan hanya ditemukan di pulau Borneo dan Sumatera. Ketiga spesies orang utan, yaitu orang utan Borneo (*Pongo pygmaeus*), orang utan Sumatera (*Pongo abelii*) dan orang utan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) berstatus terancam kritis.[1] Analisis Kelayakan Populasi dan Habitat atau Population and Habitat Viability Assessment[2] (PHVA) terbaru dan terperinci, yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan terbit pada tahun 2017 menyatakan bahwa total populasi orang utan liar secara keseluruhan mencapai 71.820 individu. Individu tersebut ditemukan dalam 55 unit populasi dan metapopulasi di kedua pulau itu. Sekitar 80% orang utan berada di lima provinsi di Kalimantan yang merupakan wilayah Indonesia di pulau Borneo.

SPESIES (NAMA UMUM)	SPESIES (NAMA ILMIAH)	JUMLAH POPULASI	TOTAL
Orang utan Sumatera	*Pongo Abelii*	14,470	**14,470**
Orang utan Borneo	*Pongo pygmaeus morio*	14,630	**57,350**
	Pongo pygmaeus pygmaeus	4,520	
	Pongo pygmaeus wurmbii	38,200	
			71,820

Tabel 1
Rincian populasi orang utan liar berdasarkan spesies dan sub-spesies yang memperlihatkan satu spesies orang utan Sumatera dan tiga sub-spesies orang utan Borneo.

**Catatan – dalam PHVA tahun 2017, orang utan Tapanuli belum diklasifikasi sebagai spesies terpisah dari orang utan Sumatera, dan oleh karena itu disatukan dalam angka orang utan Sumatera. are included in the Sumatran orangutan figures.*

Konversi hutan menjadi ancaman bagi orang utan

Konversi hutan dataran rendah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan tanaman industri, konsesi penebangan kayu, lahan pertanian berskala kecil, dan pertambangan berdampak sangat besar dalam pengurangan habitat orang utan. Perburuan, perdagangan satwa secara ilegal, konflik manusia-orang utan dan penyakit semakin mengurangi jumlah populasi orang utan. Orang utan sangat rentan terhadap gangguan habitat dan populasi karena wilayah jelajahnya yang begitu luas dan sejarah hidupnya yang berjalan begitu lambat; orang utan mempunyai interval antar kelahiran yang paling lama dari semua spesies mamalia terestrial,[3] umumnya enam sampai sembilan tahun, sehingga populasi sulit untuk cepat pulih setelah terjadi gangguan.

‘Perburuan, perdagangan satwa secara ilegal, konflik manusia-orang utan, dan penyakit semakin mengurangi jumlah populasi orang utan.’

Induk dan anak orang utan di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
Shutterstock

Upaya konservasi terfokus pada kawasan lindung

Berbagai inisiatif konservasi telah dilaksanakan untuk memerangi ancaman tersebut. Indonesia mempunyai sistem taman nasional dan kawasan lindung lainnya yang cukup ekstensif, dan sejak awal tahun 1970an sampai sekarang, kegiatan konservasi lebih banyak difokuskan pada kawasan tersebut. Selama ini hasilnya cenderung setengah-setengah. Kawasan lindung telah mengalami kebakaran lahan dan hutan; konversi untuk pertanian berskala kecil dan besar, pembangunan infrastruktur jalan dan areal pemukiman, serta kepunahan orang utan secara lokal. Namun demikian, kawasan lindung masih mempunyai beberapa populasi orang utan berjumlah paling besar dengan perlindungan yang paling baik. Kawasan tersebut termasuk Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Tanjung Puting di Provinsi Kalimantan Tengah dengan populasi orang utan masing-masing sebesar 5.800 dan 4,180 ekor,[2] dan Taman Nasional Gunung Palung di Provinsi Kalimantan Barat dengan populasi orang utan sebesar 2.500 ekor.[2]

Konsesi perusahaan menjadi kunci untuk masa depan orang utan

Meskipun kawasan lindung tersebut menjadi sangat penting untuk konservasi orang utan, analisis Aidenvironment memperlihatkan bahwa dari keseluruhan 14.110.153 hektar (ha) habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di Indonesia, baru 3.456.191 ha (24%) saja yang terdapat di dalam batas areal kawasan lindung. Kawasan lindung tersebut berupa taman nasional, cagar alam, taman margasatwa dan hutan lindung. Di bentang alam yang tidak dilindungi di mana sebagian besar orang utan berada, perusahaan pemegang izin konsesi seringkali merupakan pemangku kepentingan utama. Konsesi tersebut umumnya merupakan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI) atau konsesi penebangan kayu, yang mencakup sekitar 30% dari luas daratan Indonesia. Beberapa kajian telah berupaya untuk mengidentifikasi luas habitat orang utan di areal konsesi perusahaan, namun selama ini analisis terhambat oleh sektor pemanfaatan lahan dan sistem perizinan di Indonesia yang kurang transparan, dan keengganan para pemegang konsesi untuk bersifat terbuka mengenai bank tanah konsesinya.

Sampai saat ini, analisis terbaik mengenai habitat orang utan di Indonesia adalah hasil Analisis Kelayakan Populasi dan Habitat (PHVA) dari tahun 2016 yang meliputi beberapa konsesi perusahaan. Sebagai contoh, dari 17 bentang alam yang menjadi habitat subspesies P. pygmaeus wurmbii (Gambar 1), tujuh di antaranya teridentifikasi mempunyai satu atau lebih konsesi perusahaan yang disebutkan nama-namanya. Di bentang alam lainnya, konsesi perusahaan tidak disebutkan, namun ada. Unit habitat orang utan yang lebih kecil di bentang alam tersebut seringkali didominasi oleh konsesi perusahaan. Salah satu contoh adalah unit habitat Arabela (Arut-Belantikan) yang terletak di bentang alam Arabela-Schwaner di Provinsi Kalimantan Tengah di mana terdapat sekitar 12.462 ekor orang utan[2] (Gambar 1). Di unit habitat Arut-Belantikan terdapat 2.698 sampai 3.526 ekor[2] dalam 483.039 ha habitat orang utan, di mana hampir separuhnya (237.434 ha) terdapat di dalam enam areal konsesi perusahaan: satu konsesi HTI, tiga konsesi penebangan kayu, dan dua konsesi perkebunan kelapa sawit.

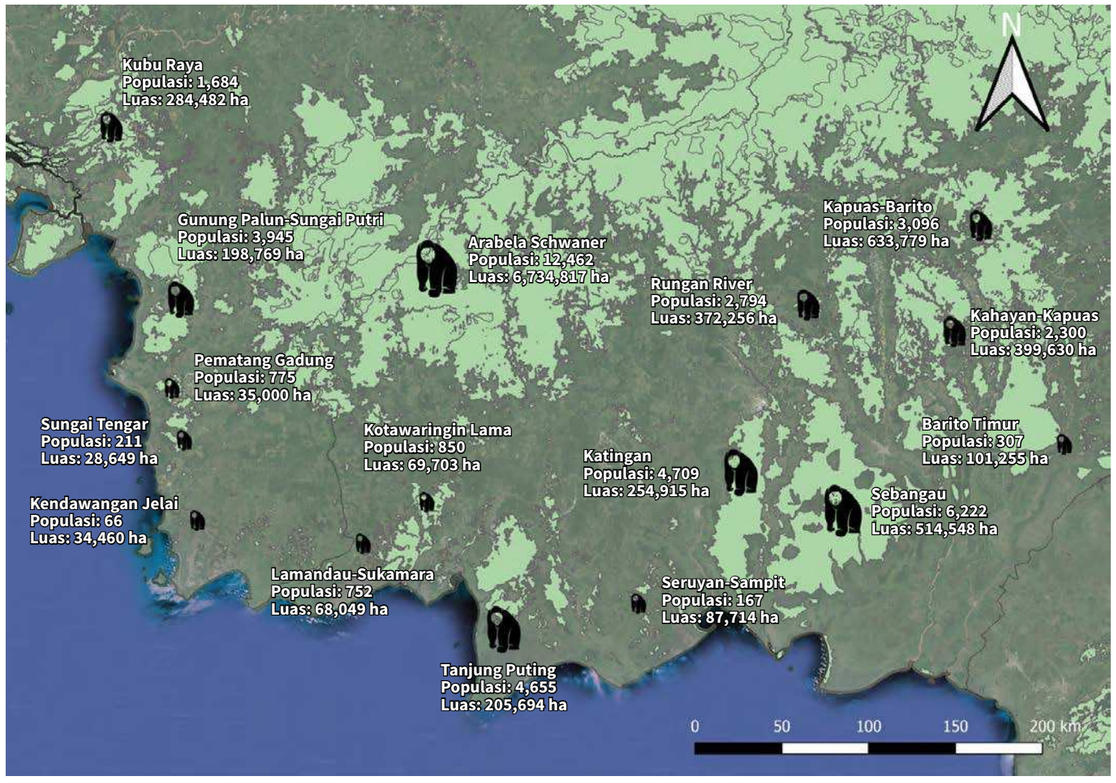

Gambar 1

Bentang alam orang utan Borneo tengah (*Pongo pygmaeus wurmbii*) yang dibahas dalam laporan ini. Estimasi ukuran populasi diambil sebagai batas tertinggi untuk masing-masing bentang alam. *(Sumber: PHVA orang utan, 2017)*

Intervensi perusahaan di bentang alam berhutan yang merupakan habitat orang utan

Sektor pertanian dan kehutanan cenderung dianggap sebagai satu kesatuan. Namun, meskipun ada berbagai persamaan dalam cara operasionalnya konsesi perkebunan kelapa sawit, HTI dan penebangan kayu, serta banyak kepemilikan yang tumpang tindih atas konsesi tersebut,[4] sektor ini dan cara operasionalnya cukup berbeda satu sama lain. Bahkan dalam sektor-sektor ini, kinerja keberlanjutan pemilik konsesi seringkali sangat tergantung pada pasar penjualannya. Kehadiran habitat orang utan di suatu konsesi perusahaan belum tentu berarti orang utan masih hidup di konsesi tersebut. Atau apabila ada, orang utan di konsesi belum tentu beresiko ditangkap atau dibunuh. Namun, pada umumnya, dengan semakin menyusutnya patch hutan habitatnya sebagai akibat dari keberadaan konsesi perusahaan, maka orang utan semakin sulit untuk bertahan hidup di semua bentang alam tersebut.

Terdapat berbagai macam dukungan yang dapat diberikan oleh perusahaan konsesi terhadap upaya konservasi orang utan. Pada umumnya, dukungan tersebut akan berupa kegiatan konservasi atau restorasi di dalam areal konsesi. Beberapa perusahaan sudah menerapkan program untuk memonitor dan melindungi orang utan di areal konsesinya:

- Oji Holdings sedang bekerja dengan Orangutan Foundation UK dan Indonesian Orangutan Foundation (YAYORIN) untuk mengembangkan jalur koridor yang menghubungkan habitat orang utan di PT Korintiga Hutani untuk membantu melestarikan 67 orang utan yang menurut Oji Holdings hidup di dalam areal konsesi tersebut.[5],[6],[7]

- Di konsesinya bernama PT Arrtu Energy Resources di Provinsi Kalimantan Barat yang terdegradasi dan terdampak kebakaran,[8] Eagle High melaksanakan Project Amour.[9] Eagle High mengklaim bahwa proyek tersebut mempunyai tim patroli dan konservasi yang mengidentifikasi hampir 3.000 sarang orang utan dan populasi di atas 30 individu, termasuk beberapa induk dan anaknya.

- Alas Kusuma Group mempunyai proyek berjangka panjang dengan WWF Indonesia untuk memonitor dan melestarikan populasi orang utan di konsesi PT Suka Jaya Makmur seluas 171.300 ha. Pada bulan August 2020, PT Suka Jaya Makmur mengadakan sensus orang utan di blok utara konsesi dan mengidentifikasi 185 sarang orang utan.[10]

- Pada tahun 2015, Dwima Group mengumumkan komitmen terhadap konservasi orang utan di seluruh areal konsesi penebangan kayunya,[11] yang secara keseluruhan mencapai sekitar 450.000 ha. PT Dima Jaya Utama memperoleh sertifikasi Forest Stewardship Council (selanjutnya FSC) pada tahun 2013[12] dan mempunyai populasi orang utan sebanyak 63 ekor[2] di unit habitat perbukitan Samba-Kahayan (Schwaner Timur) di bentang alam Arabela-Schwaner.

Intervensi perusahaan juga dapat berupa bantuan keuangan untuk proyek di sekitar areal konsesi, atau di tempat lain yang tidak terkait:

- Eagle High juga mendukung proyek Rimba Raya,[13] dengan menjanjikan pendanaan selama 25 tahun melalui Mekanisme Konservasi Komoditas Berkelanjutan dari Lestari Capital.[14]

- Perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia bernama GoldenAgri Resources[15] bekerjasama dengan Orangutan Foundation International untuk melepasliarkan orang utan bekas peliharaan di areal proyek Rimba Raya dan mendukung kegiatan pendidikan konservasi dan sosialisasi.

- Selain bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) untuk melindungi habitat orang utan di dalam dan di sekitar areal nilai konservasi tinggi (NKT)nya di PT Kalimantan Sawit Abadi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Sawit Sumbermas Sarana[16] juga memberikan areal seluas 1.434 ha di Pulau Salat kepada BOSF untuk menampung 200 orang utan yang telah diselamatkan olehnya.

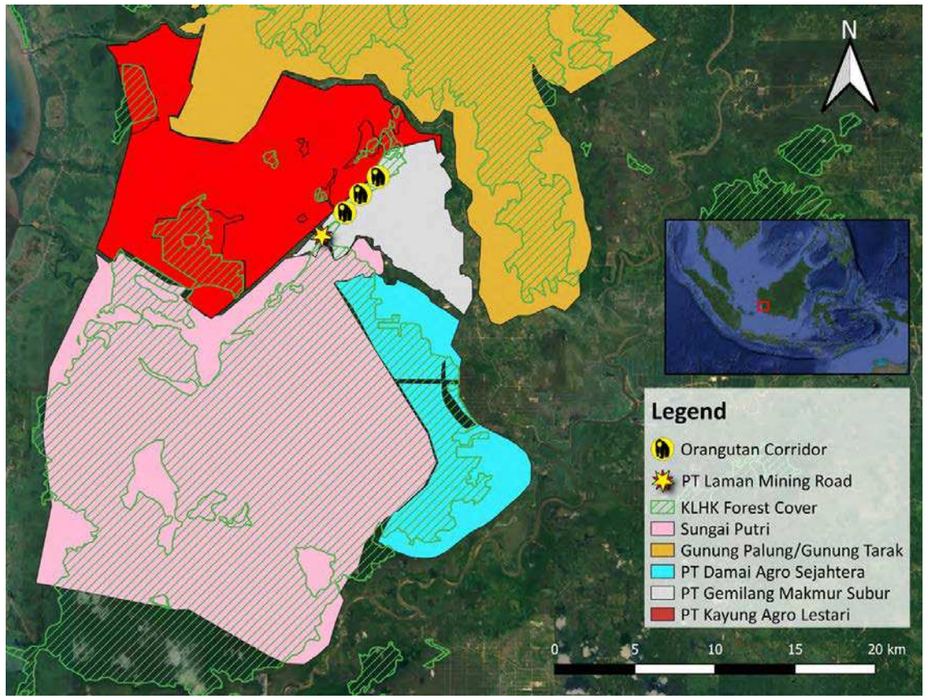

Gambar 2
Areal koridor yang menghubungkan Sungai Putri dengan Gunung Palung dan Gunung Tarak

Menghubungkan Taman Nasional Gunung Palung dengan Sungai Putri: Intervensi perusahaan dalam kemitraan dengan LSM

Salah satu intervensi perusahaan yang paling ambisius di bentang alam orang utan adalah proyek di mana Aidenvironment ikut terlibat dalam upaya perusahaan kelapa sawit Bumitama Gunajaya Agro dan Sustainable Trade Initiative (IDH) untuk menghubungkan dua populasi orang utan yang paling signifikan di Provinsi Kalimantan Barat. Proyek tersebut memperlihatkan apa yang dapat tercapai melalui komitmen perusahaan untuk melakukan intervensi, serta tantangan yang ada dalam melaksanakan proyek konservasi berskala besar di wilayah Kalimantan.

Proyek tersebut mengidentifikasi Taman Nasional Gunung Palung sebagai salah satu wilayah sasaran karena luasnya yang sebesar 108.000 ha dengan habitat orang utan seluas sekitar 90.000 ha. Di perbatasan Gunung Palung di sebelah tenggara terdapat kawasan Suaka Alam Gunung Tarak seluas 24.000 ha (Gambar 2). Koridor hutan yang sempit menghubungkan Gunung Tarak dengan rawa gambut Sungai Putri seluas 55.000 ha di sebelah selatan. Secara keseluruhan, metapopulasi Gunung Palung-Sungai Putri terdiri dari 3.280 ekor orang utan.

Baik Gunung Tarak maupun Gunung Palung berada di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rawa gambut Sungai Putri mencakup 55.000 ha, termasuk areal HTI seluas 48.400 ha yang dioperasikan oleh PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan perkebunan kelapa sawit PT Damai Agro Sejahtera yang dioperasikan oleh Bumitama Gunajaya Agro. PT Mohairson Pawan Khatulistiwa adalah perusahaan Indonesia yang berkaitan dengan perusahaan investasi yang didukung oleh Tiongkok.[17] Setelah kampanye LSM menyoroti dampak dari pengembangan konsesi terhadap metapopulasi Gunung Palung-Sungai Putri, maka PT Mohairson Pawan Khatulistiwa menjual konsesinya kepada perusahaan baru yang didirikan untuk melestarikan hutan di areal konsesi tersebut. Bersama PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, di bawah strategi pengelolaan yang baru, LSM International Animal Rescue Indonesia sedang melaksanakan program konservasi holistik di dalam dan di luar areal konsesi tersebut. Proyek-proyeknya difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan restorasi hutan, dan pada saat yang sama pada pelestarian populasi orang utan di dalam konsesi dan di areal yang lebih luas.

Konsesi perkebunan kelapa sawit berbagi bentang alam

Koridor yang menghubungkan Gunung Tarak dan Sungai Putri berada di antara dua areal konsesi perkebunan kelapa sawit. Di sebelah barat ada PT Kayung Agro Lestari seluas 18.000 ha yang dioperasikan oleh Austindo Nusantara Jaya. Di sebelah timur ada PT Gemilang Makmur Subur seluas 18.000 ha yang dioperasikan oleh Bumitama Gunajaya Agro.

Pada tahun 2016, Aidenvironment mulai bermitra dengan Bumitama Gunajaya Agro dan IDH untuk memperkuat perlindungan koridor tersebut. Antara lain, proyek ini memberikan dukungan kepada 2.500 petani sawit yang beroperasi di sekitar koridor, merestorasi 400 ha habitat terdegradasi, dan menyelenggarakan pelatihan untuk staf Bumitama Gunajaya Agro dan masyarakat untuk melaksanakan patroli dan memantau orang utan yang menggunakan koridor.

Pada awalnya, proyek yang bersifat ambisius tersebut didesain sedemikian rupa agar staf Bumitama Gunajaya Agro dan masyarakat di sekitar koridor ini dapat melanjutkan kegiatannya tanpa bantuan eksternal. Apabila berhasil, proyek seharusnya dapat mengamankan kemampuan orang utan untuk memperluas wilayah jelajahnya dan bermigrasi antara kedua habitat penting tersebut. Namun, nasib koridor itu yang kurang memuaskan setelah proyek berakhir pada tahun 2018 memperlihatkan kompleksitasnya intervensi perusahaan dalam kegiatan konservasi di dalam dan di sekitar areal konsesinya.

Kompleksitas intervensi perusahaan

Perusahaan tambang PT Laman Mining memegang izin untuk mengeksplorasi cadangan bijih bauksit yang cukup luas di Kabupaten Ketapang. Areal izinnya bertumpang tindih dengan konsesi PT Kayung Agro Lestari dan areal konservasi di bagian selatannya.[18] Hal ini menjadi sumber konflik antara kedua perusahaan tersebut selama lebih dari 10 tahun.[19] Setelah cukup lama tidak aktif, mulai tahun 2018 PT Laman Mining mengaktifkan kembali izinnya dan mulai melakukan kegiatan penggalian.[20] Kegiatan tersebut termasuk pembukaan jalan sepanjang 1,5 km dengan lebar 30 meter yang memotong bagian selatan koridor[21] (Gambar 3).

Apabila dikembangkan sepenuhnya, maka areal tambang PT Laman Mining dan berbagai perkembangan terkait akan merusakkan habitat dan meniadakan kesempatan orang utan untuk bergerak antara Gunung Tarak dan Sungai Putri melalui jalur koridor. Perundingan antara ketiga perusahaan, pemerintah setempat dan LSM sedang berlangsung. Kasus ini memperlihatkan apa yang dapat tercapai oleh perusahaan konsesi jika kegiatan konservasi diperluas di luar areal konsesinya, serta keharusan untuk memperhatikan keseluruhan bentang alam dan unit habitat orang utan. Namun demikian, kasus ini juga memperlihatkan keterbatasan proyek konservasi apabila tidak ada komitmen dari semua pemangku kepentingan yang berada di bentang alam yang bersangkutan.

Gambar 3
Citra satelit memperlihatkan pembangunan jalan tambang PT Laman Mining yang merusakkan koridor orang utan yang menghubungkan Sungai Putri dan Gunung Tarak. Populasi orang utan di areal tersebut menjadi terfragmentasi dan terpisah satu sama lain.

Kisah peringatan: Kasus Taman Nasional Tanjung Puting

Kasus Taman Nasional Tanjung Puting memperlihatkan mengapa keterlibatan perusahaan konsesi dalam konservasi orang utan menjadi begitu penting. Taman Nasional Tanjung Puting yang seluas 415.040 ha terletak di semenanjung di bagian selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut hasil PHVA, populasi orang utan liar di taman nasional tersebut mencapai 4.180 ekor, dengan habitat seluas 159.364 ha. Tanjung Puting, yang boleh dibilang kawasan taman nasional yang paling terkenal di wilayah Kalimantan, dikenal karena populasi orang utannya, baik yang liar maupun bekas peliharaan yang sudah dilepaskan kembali, serta studi berjangka panjang yang dimulai oleh Birute Galdikas pada tahun 1971.[22] Meskipun terkenal, sejarah Tanjung Puting ada baik-buruknya yang dilanda pembalakan liar, kebakaran luas dan perambahan. Saat ini, fungsi zona penyangga taman nasional tersebut hilang total karena sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan habitat orang utan yang sangat rusak atau bahkan hilang sama sekali. Situasi serupa tercermin di seluruh jaringan kawasan lindung di Indonesia.

Taman Nasional Tanjung Puting berbatasan dengan Sungai Sekonyer di sebelah utara. PT Andalan Sukses Makmur, yaitu perkebunan kelapa sawit seluas 9.276 ha yang dioperasikan oleh Bumitama Gunajaya Agro terdapat di sebelah utara sungai tersebut.[23] Di sebelah utara PT Andalan Sukses Makmur adalah PT Bumi Langgeng Perdanatrada, yaitu areal konsesi kelapa sawit seluas 8.877 ha yang dioperasikan oleh Eagle High Plantations (Gambar 4). Bumitama Gunajaya Agro mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan di PT Andalan Sukses Makmur pada tahun 2013,[24] sehingga memicu pengaduan yang diajukan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) oleh Friends of the Orangutans dan International Animal Rescue.[25] Pada tahun yang sama, LSM-LSM di daerah itu melaporkan penemuan beberapa mayat orang utan di berbagai lokasi di sepanjang perbatasan antara PT Andalan Sukses Makmur dan PT Bumi Langgeng Perdanatrada,[26] termasuk empat tengkorak orang utan.[27] PHVA merujuk survei yang diadakan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation pada tahun 2013 di 1.000 ha hutan di PT Andalan Sukses Makmur yang menemukan 10 orang utan. Selama proses penyiapan laporan ini, Aidenvironment menghubungi Bumitama Gunajaya Agro untuk memastikan jumlah orang utan yang terdapat di areal konsesinya per tahun 2021, namun Bumitama Gunajaya Agro tidak memberikan jawaban.

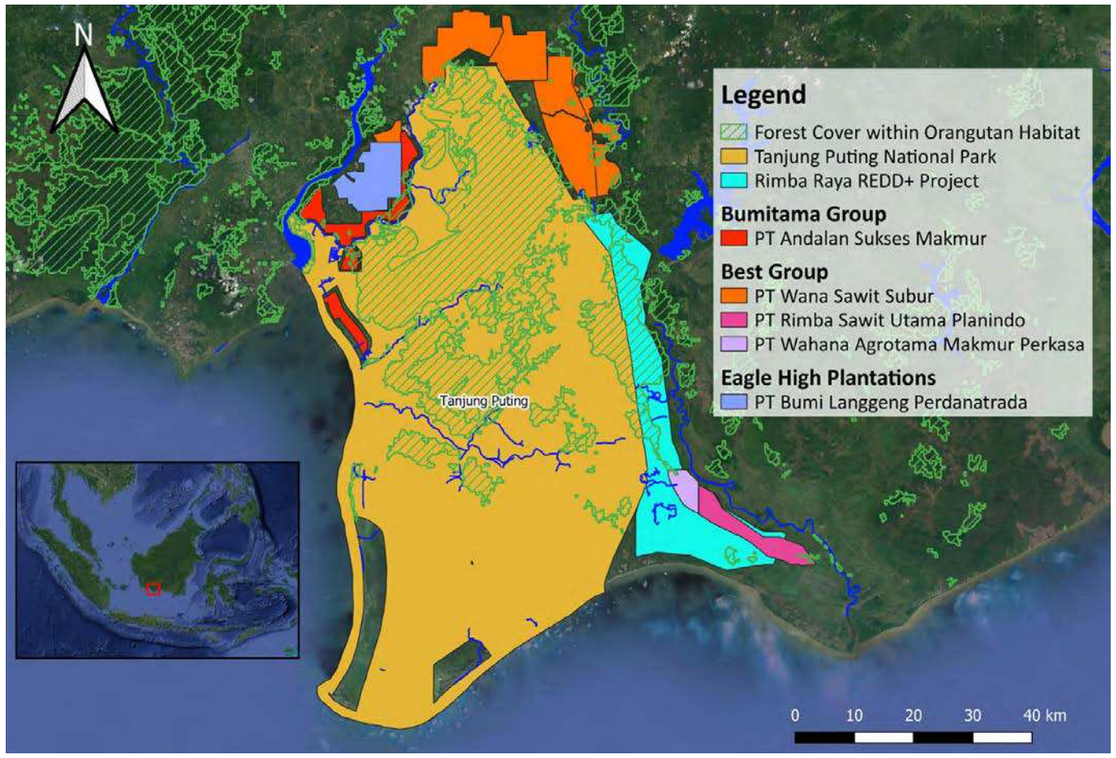

Gambar 4
Areal konsesi perusahaan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting di Provinsi Kalimantan Tengah

> ‘Sekarang, tinggal sedikit tutupan hutan di areal konsesi, dan hutan yang masih tersisa tetap mengalami kegiatan pembukaan; dari tahun 2016 sampai 2020, sekitar 350 ha lahan gambut dan hutan gambut dibuka.’

Pada tahun 2012, pengaduan RSPO menuduh anak perusahaan Eagle High bernama PT Bumi Langgeng Perdanatrada, melakukan pengeringan lahan gambut dan perambahan ke dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. PT Bumi Langgeng Perdanatrada menanggapinya[28] dengan menyatakan bahwa tidak ada kegiatan pembukaan lahan sejak tahun 2011, dan menunjukkan adanya sungai di antara areal konsesinya dan kawasan tanam nasional. Pembukaan di PT Bumi Langgeng Perdanatrada sudah menghilangkan seluruh tutupan hutan di areal konsesi tersebut. Eagle High membenarkan kepada Aidenvironment bahwa dulu ada koridor di konsesi di mana karyawan Eagle High pernah melihat “dua orang utan”, tetapi koridor terbakar habis pada tahun 2015.

Areal konsesi yang paling besar, yang terletak di perbatasan timur laut kawasan taman nasional, adalah PT Wana Sawit Subur Lestari milik Best Group Indonesia. Konsesi tersebut dibagi dalam empat blok penanaman. Kegiatan di konsesi dimulai pada tahun 2007.[29] Pada tahun 2008, melalui kegiatan patroli di perbatasan oleh Orangutan Foundation International diketahui bahwa Best Group telah melakukan kegiatan pembukaan di luar areal konsesinya dan merambah ke kawasan tanam nasional.[30] Sekarang, tinggal sedikit habitat orang utan di areal konsesi, dan hutan yang masih tersisa tetap mengalami kegiatan pembukaan; dari tahun 2016 sampai 2020, sekitar 350 ha lahan gambut dan hutan gambut dibuka. Deforestasi ini menimbulkan engagement oleh para pembeli Best Group yang mematuhi NDPE. Pembeli minyak kelapa sawit bernama Louis Dreyfus Company melakukan engagement dengan Best Group dan memaksakan penerbitan perintah penghentian kerja pada tanggal 6 Maret 2020.[31] Louis Dreyfus Company juga menuntut agar Best Group menerapkan kebijakan keberlanjutan.

Perbatasan timur kawasan Taman Nasional Tanjung Puting selalu menyediakan kesempatan terbaik untuk perluasan, karena merupakan satu-satunya perbatasan yang tidak berbatasan langsung dengan badan air. Pada tahun 2007, keseluruhan perbatasan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk dikonversi menjadi empat konsesi perkebunan kelapa sawit[32] yang akan diberikan kepada Best Group.[30] Untungnya, organisasi Hong Kong bernama Infinite Earth berhasil membuat penawaran agar lokasi tersebut dijadikan kawasan Hutan Konservasi dan dikelola di bawah skema REDD+. Areal tersebut, yang sekarang bernama The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project, mencakup 65.000 ha yang terdiri dari Areal Izin Konsesi seluas sekitar 36.950 ha, Areal Kerjasama dengan Taman Nasional Tanjung Puting seluas sekitar 18.640 ha, dan Areal Persetujuan Pengelolaan seluas sekitar 8.900 ha. Areal terakhir ini termasuk dua konsesi perkebunan kelapa sawit lainnya yang dioperasikan oleh Best Group, yakni PT Rimba Sawit Utama Planindo dan PT Wahana Agrotama Makmur Perkasa.

Reserve ini mempunyai tutupan hutan seluas 25.000 ha. Meskipun belum ada data mengenai orang utan liar di lokasi tersebut, sejak tahun 2016 sebanyak 100 ekor orang utan bekas peliharaan telah dilepasliarkan oleh Orangutan Foundation International di lokasi tersebut. Rimba Raya adalah proyek REDD+ terbesar di mana penurunan emisinya sudah diverifikasi[32] di bawah Verified Carbon Standard. Sekarang, sebagai daerah penyangga kecil, reserve ini merupakan satu-satunya lokasi yang masih menyediakan habitat orang utan di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dan terkepung perkebunan kelapa sawit tersebut.

Orang utan Borneo di alam terbuka
Shutterstock

Habitat orang utan di areal konsesi perusahaan

Mengidentifikasi habitat orang utan di areal konsesi

Aidenvironment memiliki basis data yang cukup ekstensif mengenai konsesi perusahaan dan berbagai informasi mengenai kepemilikannya. Berdasarkan basis data tersebut, kami dapat memonitor kegiatan pemanfaatan lahan, mengidentifikasi perusahaan maupun individu yang bertanggung jawab, dan menghubungkan deforestasi atau tindakan destruktif lainnya dengan rantai pasokan internasional. Untuk melakukan penilaian dalam laporan ini, kami menumpangtindihkan data konsesi kami dengan data habitat orang utan yang diperoleh dari PHVA. Hal ini memungkinkan kami untuk menentukan konsesi dengan areal habitat orang utan yang paling luas, serta grup perusahaan dengan akumulasi habitat orang utan yang paling besar. Kemudian, kami menumpangtindihkan kedua data tersebut dengan Peta Penutupan Lahan Tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guna mengidentifikasi habitat orang utan yang masih berhutan. Agar memperoleh gambaran tutupan hutan yang lebih akurat untuk tahun 2021, maka data habitat orang utan yang masih berhutan ditumpangtindihkan dengan Global Forest Watch GLAD alerts (peringatan deforestasi) dari tahun 2018 sampai 2021. Areal di mana deforestasi sudah terjadi dikeluarkan dari data habitat orang utan yang masih bertutupan hutan.

URUTAN	PERUSAHAAN KONSESI	GRUP PERUSAHAAN	HABITAT BERTUTUPAN HUTAN YANG MASIH TERSISA (HA)	BENTANG ALAM ORANG UTAN	UNIT HABITAT ORANG UTAN
1	PT Suka Jaya Makmur	Alas Kusuma	181,240	Arabela-Schwaner	Rongga-Perai
2	PT Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim)	Kaya Lapis Indonesia	165,274	Arabela-Schwaner	Seruyan Hulu
3	PT Sari Bumi Kusuma (Unit I and II)	Alas Kusuma	143,201	Arabela-Schwaner	Arabela (Arut-Belantikan)
4	PT Erna Djuliawati	Lyman Group	138,215	Arabela-Schwaner	Seruyan Hulu
5	PT Dwima Jaya Utama	Dwima Group	102,550	Katingan	Sambah-Katingan
6	PT Dasa Intiga	GPS Group	94,708	Kapuas-Barito (Mawas)	Mantangai (Block A)
7	PT Agathis Alam Indonesia	PT Agathis Alam Indonesia	93,249	Arabela-Schwaner	Murung Raya
8	PT Hutanindo Lestari Raya Timber	Hutanindo Lestari	88,940	Arabela-Schwaner	Seruyan Hulu
9	PT Balikpapan Wana Lestari (formerly Balikpapan Forest Industries)	Korindo	85,143	Sungai Wain	Sungai Wain Protection Forest CA Muara Kaman
10	PT Nusantata Alam Raya Sejahtera (formerly PT Nusantata Plywood Unit IX)	PT Nusantara Alam Raya Sejahtera	83,436	Arabela-Schwaner	Murung Raya

Tabel 2
10 konsesi penebangan kayu di peringkat teratas dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa

Konsesi kunci di bentang alam berhutan

Terdapat 14.110.153 ha tegakan hutan yang masih tersisa di habitat orang utan di Indonesia. Dari total luas yang masih tersisa tersebut, 4.757.727 ha (34%) terdapat di dalam areal konsesi penebangan kayu, 563.282 ha (4%) di dalam areal konsesi perkebunan kelapa sawit, dan 898.652 ha (6%) di dalam areal konsesi HTI. Secara keseluruhan, total luas 10 konsesi penebangan kayu dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa mencapai 1.175.956 ha (Tabel 2). Total luas 10 konsesi perkebunan kelapa sawit dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa mencapai 108.911 ha (Tabel 3), sedangkan untuk konsesi HTI, total luas dalam 10 konsesi dengan habitat paling besar mencapai 367.319 ha (Tabel 4).

URUTAN	PERUSAHAAN KONSESI	GRUP PERUSAHAAN	HABITAT BERTUTUPAN HUTAN YANG MASIH TERSISA (HA)	BENTANG ALAM ORANG UTAN	UNIT HABITAT ORANG UTAN
1	PT Rimba Utara	Rachmat/Oetomo families — Dharma Satya Nusantara	29,752	Arabela-Schwaner	Kapuas Hulu
2	PT Anugrah Kebun Mandiri	Palma Serasih	14,205	Sangkulirang	Pangadan
3	PT Kaltim Bhumi Palma	Sridjaja Family	12,012	Arabela-Schwaner	Murung Raya
4	PT Sumber Alam Selaras	NPC Resources — Indonesia	10,781	Kutai NP-Borang	Cagar Alam Muara Kaman
5	PT Citra Mitra Perkasa Utama *Permit was revoked in January 2022 by President of Indonesia	Fangiono Family (Ciliandry Angky Abadi)	9,149	Katingan	Smbah-Katingan
6	KSU Danum Paroy	KSU Danum Paroy	8,455	Arabela-Schwaner	Murung Raya
7	PT Marsam Citra Adiperkasa	PT Marsam Citra Adiperkasa	7,690	Arabela-Schwaner	Murung Raya
8	PT Gading Tirta Mandiri	Castlegate and Everett	6,559	Arabela-Schwaner	Kapuas Hulu
9	PT Sawit Mandiri Lestari	Sawit Sumbermas Sarana	5,276	Lamandau-Sukamara	SM Lamandau
10	Ikhsanudin — PT Permata Sawit Mandiri	PT Permata Sawit Mandiri	5,032	Arabela-Schwaner	Rongga-Perai

Tabel 3
10 konsesi perkebunan kelapa sawit di peringkat teratas dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa

‘ Terdapat 14,110,153 ha tegakan hutan yang masih tersisa di habitat orang utan di Indonesia. ’

URUTAN	PERUSAHAAN KONSESI	GRUP PERUSAHAAN	HABITAT BERTUTUPAN HUTAN YANG MASIH TERSISA (HA)	BENTANG ALAM ORANG UTAN	UNIT HABITAT ORANG UTAN
1	PT Mayawana Persada	Alas Kusuma	68,776	Kubu Raya	Mendawak
2	PT Industrial Forest Planta-tion	Nusantara Fiber	51,026	Kahayan-Kapuas	Sungai Murui Hulu
3	PT Taiyoung Engreen	Jhonlin + Taiyoung	41,609	Rungan River	Rungan Timur (Mung-ku Baru)
4	PT Mayangkara Tanaman Industri	Sumitomo Forestry	39,716	Kubu Raya	Mendawak
5	PT Tanjung Redeb Hutani	Prabowo Subianto	38,468	Wehea-Lesan	Wehea Protection Forest
6	PT Wana Hijau Pesaguan	Djarum	35,996	Pematung Gadung	Pesaguan
7	PT Surya Hutan Jaya	Sinar Mas	28,694	Kutai NP - Bonrang	Timber estate
8	PT Langgeng Bakti Persada	Dr. Suheldi SE M M	22,264	Katingan	Sambah-Katingan
9	PT Sumalindo Alam Lestari II	Salim Group	20,482	Sangkulirang	Karangan
10	PT Bukit Beringin Makmur	PT Puncak Keemasan Lumbung Dunia	20,288	Arabela-Schwaner	Seruyan Hulu

Tabel 4
10 konsesi hutan tanaman industri di peringkat teratas dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa

Kinerja keberlanjutan sektor HTI tertinggal oleh sektor perkelapasawitan dan penebangan kayu

Contoh intervensi perusahaan yang paling menonjol di bentang alam orang utan ada di sektor perkelapasawitan dan penebangan kayu. Di sektor perkelapasawitan, intervensi dimotori oleh masyarakat sipil dan tekanan dari rantai pasokan. Untuk penebangan kayu, sepertinya intervensi dipengaruhi oleh aturan yang berlaku di Indonesia tentang pemungutan kayu, persyaratan dalam skema sertifikasi kayu, dan kemampuan orang utan untuk bertahan hidup di dalam hutan yang diusahakan dengan sistem tebang pilih. Meski ada berbagai contoh proyek tertentu di areal konsesi HTI (lihat Sumitomo Forestry di bagian mengenai bentang alam Kubu Raya dan Oji Holdings yang disebutkan di atas misalnya), sektor HTI beroperasi dengan standar keberlanjutan yang lebih rendah dan pengawasan oleh masyarakat sipil yang jauh lebih sedikit dibanding sektor perkelapasawitan dan sektor penebangan kayu.

Hutan tanaman industri digunakan dalam produksi kertas dan serat tekstil, serta produk kayu dan pembangkitan energi. Sektor HTI di Indonesia didominasi oleh dua produsen besar di bidang pulp dan kertas, yaitu Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL).[33] APP dan APRIL masing-masing sebagai bagian dari grup perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle (RGE). Perusahaan Jepang bernama Marubeni Corporation juga memproduksi pulp di Indonesia, namun pada skala yang lebih kecil.[34]

Dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang paling besar di Indonesia, 16 sudah berkomitmen pada kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).[35] Sementara itu, dari 21 perusahaan HTI yang paling besar di Indonesia, baru Sinar Mas, RGE dan Marubeni saja yang mempunyai komitmen keberlanjutan yang hampir sederajat dengan kebijakan NDPE perkelapasawitan. Perbedaan yang paling besar adalah kebijakan NDPE perkelapasawitan melarang pengembangan apapun di lahan gambut, terlepas dari kedalaman gambutnya, sedangkan kebijakan keberlanjutan HTI Sinar Mas dan RGE memperbolehkan penanaman hutan tanaman di lahan gambut yang tidak bertutupan hutan.[4]

Pembukaan hutan di PT Industrial Forest Plantation
© Aidenvrionment

‘Aidenvironment menemukan bahwa lima perusahaan HTI saja bertanggung jawab atas 13.000 ha deforestasi di Indonesia.’

Terdapat indikasi kemajuan, namun deforestasi tetap terjadi

Di sektor perkelapasawitan, penerapan kebijakan NDPE oleh para pembeli utama telah mengurangi deforestasi secara signifikan. Kebijakan Sinar Mas, RGE dan Marubeni telah berdampak serupa di sektor HTI. Dari tahun 2015 sampai 2019, deforestasi di areal konsesi HTI menurun sebesar 85% dibanding tahun 2010 sampai 2012 dalam 91 konsesi yang memasokkan serat kayu kepada pabrik pulp di Indonesia milik Sinar Mas, RGE dan Marubeni.[36]

Terlepas dari perkembangan positif ini, deforestasi tepat terjadi. Aidenvironment menemukan bahwa lima perusahaan HTI saya bertanggung jawab atas 13.000 ha deforestasi di Indonesia pada tahun 2020.[37] Perusahaan tersebut adalah Nusantara Fiber Group (6.900 ha), Alas Kusuma (2.800 ha), Sumatera Dinamika Utama (1.300 ha), PT Adindo Hutan Lestari (1.200 ha) dan Sinar Mas (800 ha). Pada tahun 2021, empat perusahaan HTI saja membuka 11.000 ha hutan, hutan gambut dan lahan gambut di Indonesia. Sekali lagi, perusahaan tersebut adalah Alas Kusuma (5.300 ha) dan Nusantara Fiber (3.200 ha), ditambah Moorim Group (1.500 ha) dan PT Hutan Produksi Lestari (800 ha).

Konsesi HTI menjadi kunci dalam konservasi orang utan

Di beberapa unit habitat orang utan, konsesi HTI mencakup total luas yang lebih besar dibanding perkebunan kelapa sawit, tetapi beroperasi tanpa pembatasan pemanenan yang berlaku untuk areal konsesi penebangan kayu. Konsesi HTI ini seringkali merupakan pemangku kepentingan utama dalam pemanfaatan lahan. Apabila hutan di dalam unit habitat ini mau dilindungi, maka sektor HTI sangat perlu untuk memperbaiki kinerja keberlanjutannya.

Konsesi HTI dengan luas habitat orang utan yang paling besar ditemukan di tiga unit habitat kunci untuk orang utan: PT Mayawana Persada yang terletak di unit habitat Mendawak di bentang alam Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat; PT Industrial Forest Plantation di unit habitat Sungai Murui Hulu di bentang alam Kahayan-Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah; dan PT Taiyoung Engreen di unit habitat Rungan Timur di bentang alam Sungai Rungan. Ketiga konsesi ini juga termasuk di antara pelaku deforestasi terbesar di sektor HTI.

PHVA meliputi data populasi untuk setiap bentang alam tersebut. Bentang alam dengan data tambahan terbaik dan bukti akan populasi orang utan yang layak adalah bentang alam Sungai Rungan, di mana Borneo Nature Foundation bekerja untuk melindungi orang utan. Berbagai data tambahan tersedia untuk bentang alam Kubu Raya, namun tidak ada data sama sekali mengenai habitat orang utan di bentang alam Kahayan-Kapuas. Ketiga bentang alam ini dibahas secara lebih mendetail di bab berikut.

Satwa orang utan di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
Shutterstock

Bentang alam Sungai Rungan

Bentang alam Sungai Rungan terletak di sebelah utara kawasan Taman Nasional Sebangau. Bentang alam ini terbelah oleh Sungai Rungan. Di sebelah timur sungai tersebut, bentang alam didominasi oleh hutan kerangas yang diapit sungai lain, yaitu Sungai Kahayan di sebelah timur (Gambar 5). Areal ini mempunyai 147.357 ha habitat orang utan bertutupan hutan, dan populasi orang utan di tempat ini merupakan unit habitat Rungan Timur. Menurut perkiraan PHVA, populasi di tempat ini mencapai 1.364 sampai 2.034 individu,[2] namun, menurut penilaian lebih mendalam yang dilakukan oleh Borneo Nature Foundation beberapa tahun belakangan, populasi tersebut mencapai 2.220 sampai 3.275 individu.[38] Dengan demikian, populasi orang utan ini merupakan salah satu populasi terbesar yang tidak dilindungi. Oleh karena itu, bentang alam ini dijadikan fokus upaya konservasi intensif oleh Borneo Nature Foundation. LSM tersebut mempunyai program khusus di bentang alam ini yang terfokus pada engagement dengan perusahaan dan pengembangan strategi untuk melestarikan habitat orang utan di dalam dan di sekitar semua areal konsesi.

Selain orang utan, bentang alam ini juga kaya akan keanekaragaman hayati. Di hutannya di mana terdapat trenggiling, burung rangkong, buaya dan kura-kura, merupakan satu-satunya lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan setiap lima spesies kucing liar di pulau Borneo.[38] Di bentang alam ini, lebih dari 20.000 orang juga bermukim di 20 dusun.[39] Bentang alam ini didominasi areal konsesi perusahaan: banyak perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan satu konsesi penebangan kayu. Areal konsesi yang paling signifikan adalah PT Taiyoung Engreen, yaitu areal konsesi HTI dengan habitat orang utan bertutupan hutan terbesar ketiga di Indonesia, seluas 41.609 ha.

Mirip dengan situasi di areal konsesi PT Kayung Agro Lestari di sebelah utara Sungai Putri di Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas di atas, terdapat areal konsesi tambang zirkon seluas 84.358 ha di pinggir Sungai Kahayan.

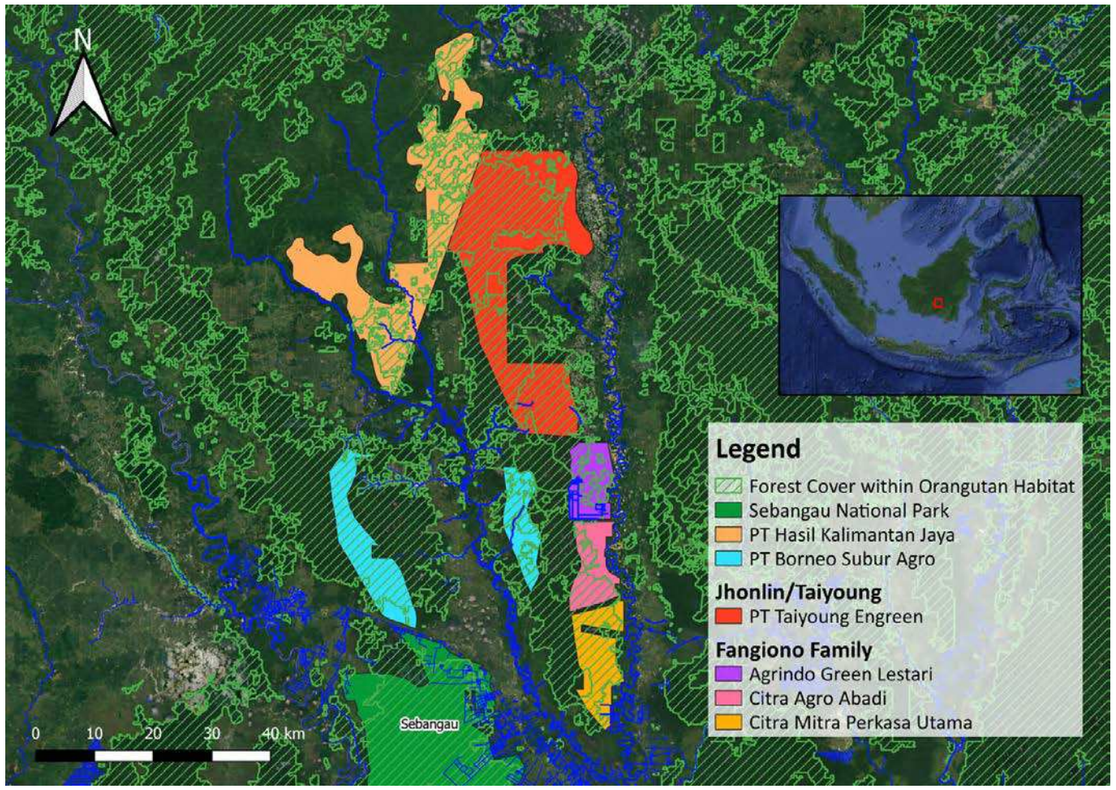

Gambar 5
Konsesi di bentang alam Sungai Rungan

PT Taiyoung Engreen

Habitat orang utan dengan sisa hutan yang paling luas di dalam areal konsesi di bentang alam ini terdapat di PT Taiyoung Engreen. Berdasarkan analisis Aidenvironment, dengan 41.609 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa (Gambar 5), PT Taiyoung Engreen berada di peringkat tiga sebagai areal konsesi HTI dengan paling banyak habitat orang utan di Indonesia.

Tujuh puluh persen areal konsesi ini merupakan hutan adat masyarakat Dayak, yang didominasi pohon Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), yang dianggap keramat oleh masyarakat Dayak setempat.[40] Pertambangan zirkon dan batubara juga berlangsung di dalam batas areal konsesi ini. Salah satu konsesi batubara di bagian barat laut areal PT Taiyoung Engreen dioperasikan oleh PT Persada Makmur Sejahtera.

Kepemilikan

PT Taiyoung Engreen dimiliki perusahaan Korea bernama Taiyoung Global Co. Ltd. (40% saham) dan perusahaan Indonesia bernama Jhonlin (30% saham). Tiga orang individu, yaitu Badrodin Haiti (mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat dari bulan Januari 2015 sampai Juli 2016), Mohamed Rafil Perdana dan Didi Basuki, masing-masing memiliki 10% saham.

Taiyoung Global Co. Ltd. berbasis di Korea Selatan. Perusahaan ini tidak mempunyai jejak kaki online, dan alamatnya yang terdaftar di Seoul dimiliki perusahaan yang dikenal dengan nama "TY".

Jhonlin adalah salah satu perusahaan Indonesia yang paling terkenal keburukannya. Perusahaan tersebut dioperasikan oleh pengusaha Indonesia bernama Haji Andi Syamsudin Arsyad (yang umum disapa Haji Isam). Haji Isam mulai berusaha di industri pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan sebelum melakukan ekspansi secara agresif di bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Haji Isam mempunyai dua anak, Liana Saputri dan Jhonny Saputra, yang memiliki saham di beberapa perusahaan di bawah bendera Jhonlin Group. Jhonlin dan keluarga besar Isam memegang izin HTI dengan total luas sebesar 57.752 ha di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas bank tanah kelapa sawit milik perusahaan ini belum diketahui, namun menurut perkiraan Aidenvironment, bank tanah tersebut mencapai sekitar 160.000 ha, yang terbagi antara sedikitnya 17 konsesi.[39] Selain perkebunan kelapa sawit, keluarga ini memiliki pabrik kelapa sawit PT Adisurya Cipta Lestari dan PT Batulicin Agro Sentosa di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pabrik kelapa sawit PT Pradiksi Gunatama di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Masalah keberlanjutan Jhonlin mengakibatkan penempatan ulang rantai pasokan

Jhonlin dan afiliasinya telah membuka 8.736 ha hutan dan lahan gambut sejak tahun 2016. Jhonlin juga dikaitkan dengan berbagai konflik lahan dengan masyarakat setempat, masalah tenaga kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini termasuk dua satpam yang ditemukan tewas di pos pengamanan PT Jhonlin Agro Mandiri dengan luka di leher, muka dan kepala, dan dikaitkannya perusahaan ini dengan kematian seorang wartawan yang sedang meliputi kegiatan Jhonlin Group.[40]

Jhonlin pernah menjadi pemasok bagi beberapa perusahaan yang mempunyai kebijakan NDPE, termasuk ADM, Golden AGRI Resources, Johnson & Johnson dan Sime Darby, namun secara berangsur-angsur dibekukan dari rantai pasokan sebagai akibat dari kegiatannya.

Harapan bahwa Jhonlin akan berkomitmen pada kebijakan NDPE untuk seluruh anak perusahaannya sudah pudar karena perusahaan ini beralih ke sektor bahan bakar nabati dalam negeri di Indonesia. Pada tahun 2021, Jhonlin merampungkan pembangunan pabrik biosolar baru yang bernama PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bambu, Provinsi Kalimantan Selatan.[41] Pabrik tersebut dapat mengolah 60 metrik ton tandan buah segar (TBS) per jam, dan menurut rencananya, 30% bahan baku produksinya akan dipenuhi oleh TBS yang dipasokkan oleh anak perusahaan Jhonlin sendiri. Pemasokan sektor bahan bakar nabati, di mana standar keberlanjutannya lebih lemah dibanding pasar NDPE, berarti Jhonlin tidak mempunyai insentif untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawitnya.

Deforestation of PT Taiyoung Engreen

Deforestasi di PT Taiyoung Engreen mencapai 3.510 ha sejak tahun 2018, termasuk 872 ha pada tahun 2021 (Gambar 6), di mana sebagian dilakukan untuk kegiatan pertambangan (Gambar 7). Hampir semua deforestasi ini terjadi di dalam habitat orang utan. Mengingat Jhonlin and Taiyoung tidak mempunyai kebijakan keberlanjutan, kriteria keberlanjutan yang rendah di pasar bahan bakar nabati (di mana Jhonlin sudah menjadi pemasok), dan jejak rekam Jhonlin selama ini, maka terdapat kemungkinan besar bahwa lebih banyak habitat orang utan akan dibuka di areal konsesinya.

Gambar 6
Deforestasi dari tahun 2018 sampai 2021 di PT Taiyoung Engreen. Deforestasi di bagian tenggara areal konsesi diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

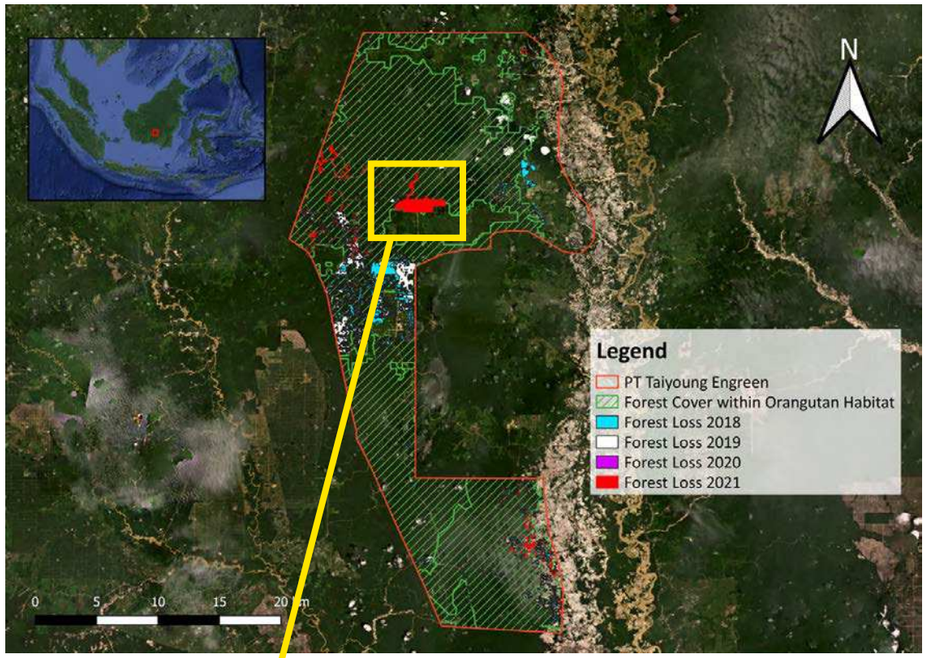

Deforestasi seluas sekitar 480 ha di dalam PT Taiyoung Engreen pada tahun 2021.

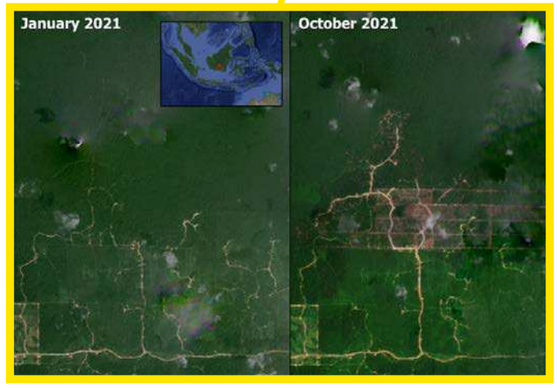

Gambar 7
Kegiatan pertambangan zirkon di dalam batas areal PT Taiyoung Engreen. Bantaran sungai di bagian konsesi ini sudah mengalami erosi berat sebagai akibat dari pembukaan hutan riparian.

Orang utan liar di Provinsi
Kalimantan Tengah, Indonesia
Shutterstock

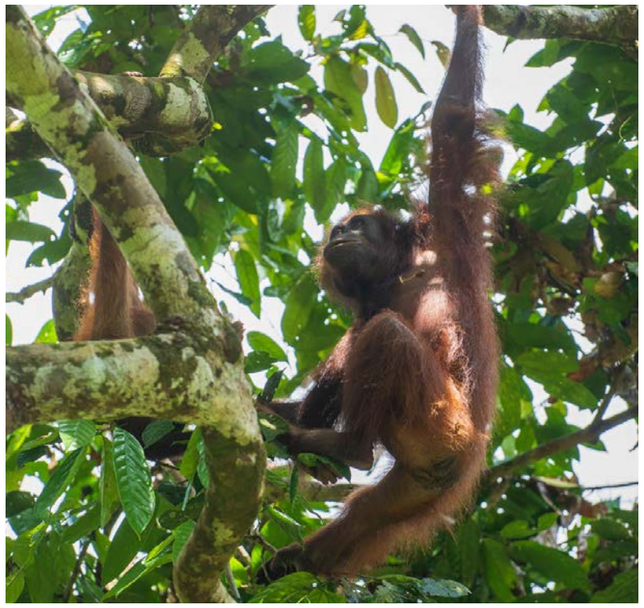

PT Hasil Kalimantan Jaya

Habitat orang utan dengan sisa hutan terbesar berikutnya di bentang alam ini adalah konsesi penebangan PT Hasil Kalimantan Jaya. Areal konsesi dengan luas 51.522 ha[42] tersebut masih mempunyai 9.504 ha habitat orang utan yang tersisa. Konsesi ini berbatasan sepanjang sekitar 18 kilometer dengan bagian timur laut areal konsesi PT Taiyoung Engreen (Gambar 5). Belum banyak yang diketahui tentang PT Hasil Kalimantan Jaya karena perusahaan ini tidak mempunyai situs web dan belum ada informasi yang tersedia untuk umum mengenai orang utan maupun kebijakan dalam areal konsesinya.

PT Citra Mitra Perkasa Utama

PT Citra Mitra Perkasa Utama adalah konsesi perkebunan kelapa sawit yang pernah dimiliki Ciliandry Angky Abadi Group, yang diduga sebagai bagian dari usaha keluarga Fangiono, yang juga memiliki PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi. Namun, pada bulan Januari 2022, izin PT Citra Mitra Perkasa Utama dibatalkan oleh Presiden Indonesia sehingga konsesi tidak dapat dikembangkan lagi oleh perusahaan tersebut. Masih belum jelas perkembangan pembatalan ini ke depan maupun dampaknya bagi hutan dan orang utan di dalam areal konsesi. PT Citra Mitra Perkasa Utama masih mempunyai 9.156 ha habitat orang utan bertutupan hutan. Oleh karena konsesi ini terdapat di bagian selatan bentang alam ini dalam area hutan rawa gambut dataran rendah, maka besar kemungkinannya bahwa orang utan menggunakan hutan di areal konsesi ini yang merupakan tipe habitat ideal bagi orang utan.

PT Borneo Subur Agro

PT Borneo Subur Agro adalah areal konsesi HTI dengan 18.595 ha habitat orang utan bertutupan hutan. PT Borneo Subur Agro dibagi dua blok di sebelah timur dan barat Sungai Rungan. Blok timur mempunyai 5.486 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa. Di dalam blok timur ini terjadi pertambangan liar berskala kecil untuk emas dan zirkon. PT Borneo Subur Agro dimiliki Dr Suheldi SE, MM, seorang pengusaha lokal yang mencalonkan diri sebagai Walikota Binjai pada tahun 2020.[43] Dr Suheldi pernah mempunyai jabatan di PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu perusahaan yang diketahui berkaitan denga Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto.[44] Blok barat PT Borneo Subur Agro juga mempunyai habitat orang utan bertutupan hutan seluas 13.109 ha yang merupakan bagian penting dari unit habitat Rungan Barat. Unit ini terletak di sebelah barat Sungai Rungan, di sebelah utara Taman Nasional Sebangau.

Area prioritas untuk konservasi

Blok hutan di bagian utara PT Taiyoung Engreen (Gambar 8 dan 9) merupakan hutan yang paling utuh di dalam areal konsesi tersebut yang menurut Borneo Nature Foundation mempunyai populasi orang utan yang cukup besar dan sangat layak. Dengan menggunakan perkiraan PHVA sebanyak 0,88 sampai 1,31 individu orang utan/km^2, maka dapat diperkirakan bahwa setidaknya ada 160-240 ekor orang utan di dalam area ini. Sebanyak 84% dari areal ini dikelola oleh PT Taiyoung Engreen, sehingga perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup populasi orang utan ini untuk jangka panjang. Area tersebut dikelilingi jalan sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa populasi ini akan tetap terisolasi, kecuali apabila terjadi tindakan restoratif atau semacam penghubung habitat dapat dikembangkan. Terdapat beberapa jalan tanah kecil di dalam blok hutan ini, yang juga dapat menimbulkan degradasi lanjutan terhadap habitat orang utan.

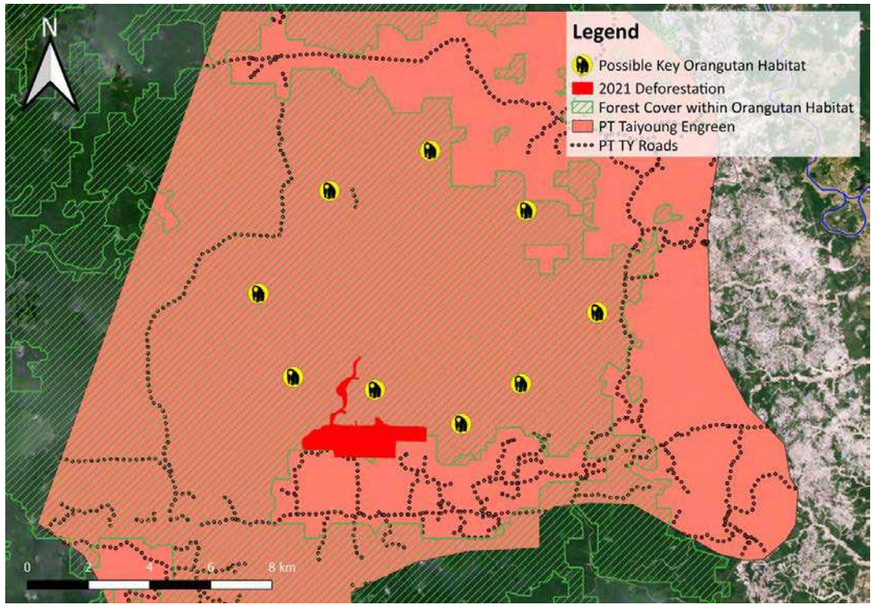

Gambar 8
Blok hutan di bagian utara PT Taiyoung Engreen yang perlu ditetapkan untuk konservasi orang utan

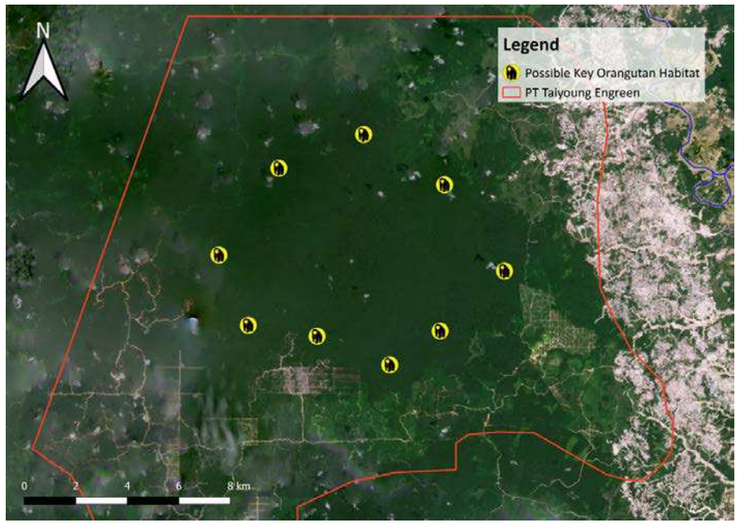

Figure 9
Citra satelit blok hutan di bagian utara PT Taiyoung Engreen yang perlu ditetapkan untuk konservasi orang utan
Citra dari bulan November 2021
(Sumber: Planet).

Bentang alam Kahayan-Kapuas

Gambar 10
Habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di bentang alam Kahayan-Kapuas

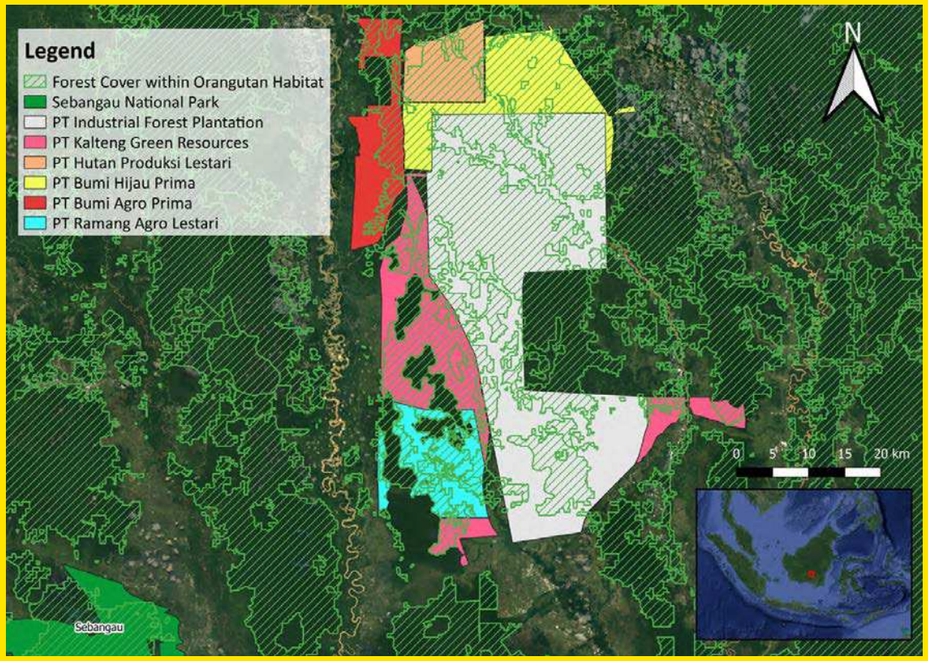

Bentang alam Kahayan-Kapuas mempunyai hampir 400.000 ha habitat orang utan. Terletak di sebelah utara blok B[45] dari Mega Proyek Sejuta Hektar Sawah yang gagal pada pertengahan tahun 1990an, nama bentang alam Kahayan-Kapuas berasal dari nama dua sungai yang membentuk batas alam di sebelah timur dan barat bentang alam ini. Didominasi hutan rawa gambut, menurut perkiraan PHVA bentang alam ini merupakan tempat hidup bagi sekitar 1.065 sampai 2.300 individu orang utan, namun baru satu dari tujuh unit habitat orang utannya yang sudah disurvei.[2] PT Industrial Forest Plantation, yang merupakan areal konsesi yang paling penting di bentang alam ini, dikelilingi areal konsesi di perbatasan utara dan baratnya (Gambar 10).

PT Industrial Forest Plantation

PT Industrial Forest Plantation, yang terletak di tengah bentang alam Kahayan-Kapuas, mempunyai luas areal sebesar 101.840 ha, di mana 52.125 ha di antaranya merupakan habitat orang utan bertutupan hutan. Dengan demikian, konsesi ini berada di peringkat dua untuk konsesi HTI di Indonesia dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan. Sejak tahun 2018, 9.673 ha hutan telah dibuka di areal PT Industrial Forest Plantation (Gambar 11, 12 dan 13), sebagian besarnya dalam bentuk garis lurus yang melintasi bagian tengah areal konsesi. Tidak semua kegiatan pembukaan dilakukan untuk HTI karena PT Sumber Kencana Bumi Kaya mengoperasikan tambang zirkon di sepanjang sungai di pojok timur laut PT Industrial Forest Plantation[46] (Gambar 14).

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT Trustindo Prima Karya pada bulan Juni 2019[47] sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diajukan oleh PT Industrial Forest Plantation, luas areal yang ditetapkan sebagai areal lindung di PT Industrial Forest Plantation mencapai 15.800 ha, di mana 80 persennya masih berhutan. Areal lindung seluas 15.800 ha tersebut terdiri dari sempadan sungai seluas 3.600 ha, Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) seluas 3.200 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 3.300 ha, dan ekosistem gambut dengan fungsi lindung seluas 5.700 ha.

Penilaian pada tahun 2014 atas nama PT Industrial Forest Plantation telah mengidentifikasi keberadaan orang utan di dalam batas areal konsesi serta satwa dan tumbuhan lain yang dilindungi, termasuk 29 spesies burung, 22 spesies mamalia, enam spesies reptil dan 15 spesies pohon dan tumbuhan.[48] Audit yang sama oleh PT Trustindo Prima Karya mengidentifikasi konflik lahan di dalam areal konsesi dalam bentuk klaim lahan oleh masyarakat dan petani atas lahan seluas 22.100 ha.

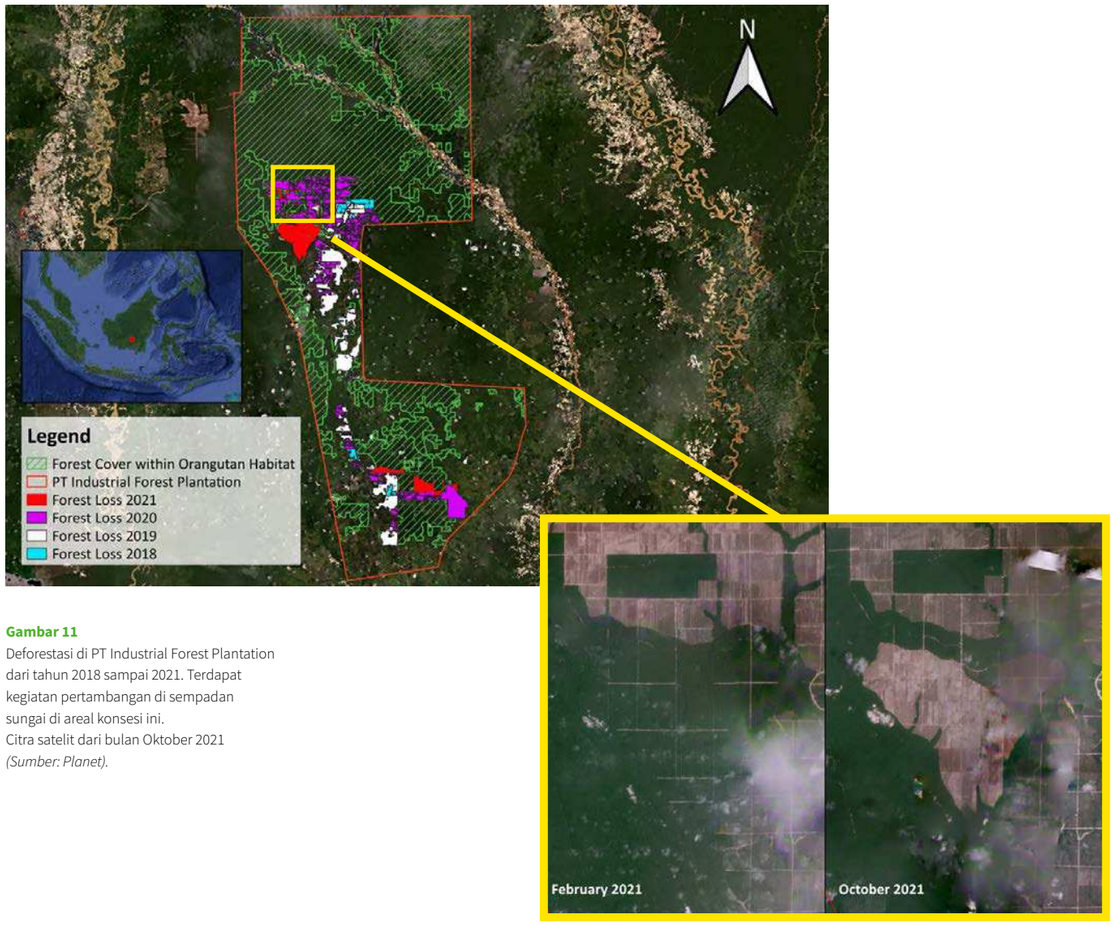

Gambar 11
Deforestasi di PT Industrial Forest Plantation dari tahun 2018 sampai 2021. Terdapat kegiatan pertambangan di sempadan sungai di areal konsesi ini.
Citra satelit dari bulan Oktober 2021
(Sumber: Planet).

Gambar 12
Deforestasi di PT Industrial Forest Plantation
(*Sumber: Aidenvironment*)

Gambar 13
Pembukaan lahan di PT Industrial Forest Plantation
(*Sumber: Aidenvironment*)

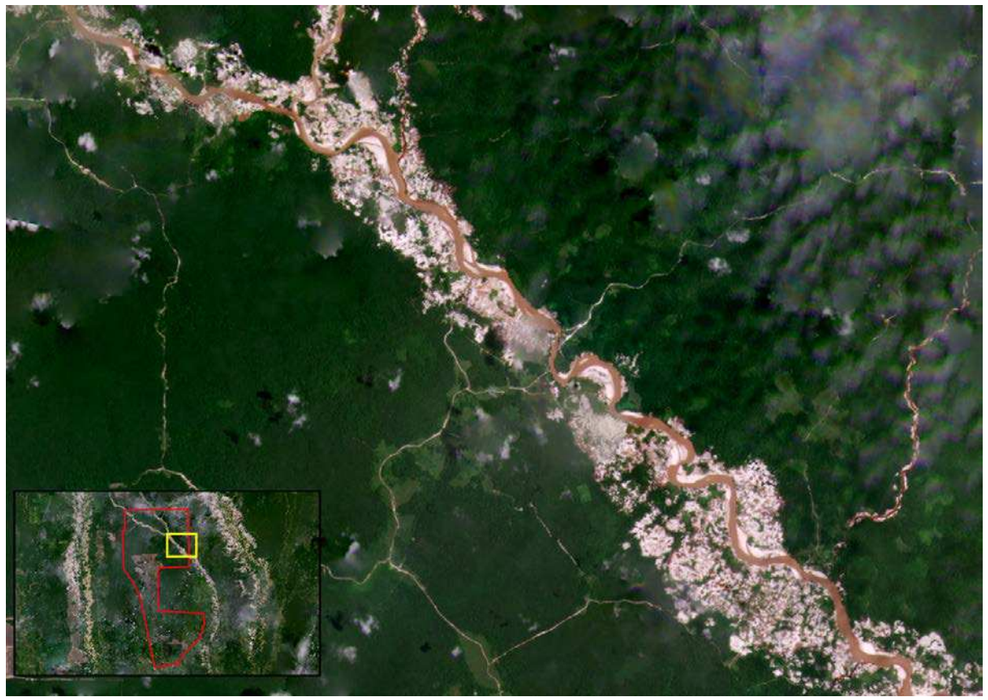

Gambar 14
Kegiatan pertambangan zirkon di sempadan sungai di PT Industrial Forest Plantation, sepertinya oleh PT Sumber Kencana Bumi Kaya
Citra satelit dari bulan Oktober 2021 (*Sumber: Planet*)

Nusantara Fiber

Nusantara Fiber Group terdiri dari beberapa perusahaan HTI, termasuk PT Bakayan Jaya Abadi, PT Permata Hijau Khatulistiwa, PT Mahakam Persada Sakti, PT Santan Borneo Abadi dan PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, dan PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah.[51] Total luas areal konsesi milik perusahaan ini mencapai 242.000 ha. Nusantara Fiber tidak mempunyai situs web maupun informasi yang terbuka untuk umum mengenai ada tidaknya kebijakan keberlanjutan. Sejak tahun 2016, terjadi lebih dari 32.000 ha deforestasi di enam konsesi milik Nusantara Fiber. Sebagian besar terjadi di PT Santan Borneo Abadi, yaitu konsesi HTI seluas 37.825 ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.[51] Konsesi-konsesi ini dioperasikan di Indonesia di bawah PT Borneo Hijau Lestari. Pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut adalah Green Meadows Finance Ltd. di Hong Kong.

Green Meadows adalah anak perusahaan Green Meadows Holdings Ltd. yang terdaftar di negara kepulauan Polinesia Samoa. Samoa termasuk dalam daftar Uni Eropa mengenai yurisdiksi yang tidak kooperatif dalam hal perpajakan, antara lain karena mempunyai "harmful preferential tax regime" atau rejim perpajakan yang menguntungkan negara termaksud dan membahayakan negara lain. Samoa juga dianggap sebagai yurisdiksi kerahasiaan di mana dokumen kepemilikan perusahaan tidak tersedia untuk umum.[51]

Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang Nusantara Fiber, beberapa dokumen kepemilikan yang tersedia mengindikasikan bahwa grup tersebut berkaitan dengan Royal Golden Eagle, yaitu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Keterkaitan tersebut melalui ketiga direktur pertama Green Meadows Fiber Products Limited di Hong Kong. Di berita koran dan akun media sosial, Green Meadows umumnya disebut sebagai grup Nusantara Fiber.[49]

PT Bumi Hijau Prima

Langsung ke arah utara PT Industrial Forest Plantation dan PT Kalteng Green Resources ada konsesi HTI bernama PT Bumi Hijau Prima (Gambar 10). Konsesi tersebut mempunyai 18.783 ha habitat orang utan bertutupan hutan. PT Bumi Hijau Prima terdaftar atas nama seorang individu bernama Sunarno, namun informasi lebih lanjut mengenai Sunarno tidak dapat ditemukan. Tidak ada situs web untuk PT Bumi Hijau Prima maupun informasi tentang kebijakan keberlanjutan atau kegiatan pelestarian orang utan. Ruas jalan selebar sekitar 13 meter melintas di antara PT Kalteng Green Resources dan PT Bumi Hijau Prima sehingga menghambat pergerakan orang utan antara patch hutan. Jalan tersebut memasuki areal PT Industrial Forest Plantation dan memotong hutan di bagian barat laut konsesi tersebut.

PT Bumi Agro Prima

Areal konsesi perkebunan kelapa sawit ini mempunyai 6.378 ha habitat orang utan bertutupan hutan (Gambar 10). Dari bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021, pembukaan hutan seluas 25 ha terjadi di dalam areal konsesi ini. Sebanyak 99% saham di PT Bumi Agro Prima dimiliki PT Bumi Gading Prima Group (BGP Group),[50] yang diketahui sebagai salah satu pemasok Musim Mas dan Apical, di mana keduanya sudah mempunyai kebijakan NDPE. Setelah terjadi engagement yang dilakukan oleh kedua grup perusahaan tersebut, per tanggal 17 Mei 2021 BGP Group mengumumkan penangguhan sementara[51] atas pembukaan lahan baru di dalam areal konsesinya. Dalam engagement lebih lanjut, Musim Mas menyampaikan rekomendasi agar BPG Group mengadakan penilaian nilai konservasi tinggi (NKT) dan stok karbon tinggi (SKT).

PT Bumi Agro Prima berbatasan sepanjang sekitar dua kilometer dengan PT Kalteng Green Resources, sehingga menyediakan kesempatan untuk pergerakan orang utan ke arah barat dari PT Kalteng Green Resources. Ruas jalan yang menandai batas utara PT Kalteng Green Resources juga melintas ke dalam PT Bumi Agro Prima, sehingga membelah hutan menjadi bagian utara dan selatan.

PT Ramang Agro Lestari

Peluang konektivitas ke arah selatan PT Kalteng Green Resources diberikan oleh PT Ramang Agro Lestari (RAL), yaitu areal konsesi HTI dengan 8.090 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa (Gambar 10). PT Ramang Agro Lestari dimiliki PT Graha Utama Lestari, yang pada gilirannya dimiliki PT Ciliandry Anky Mandiri, di mana pemiliknya adalah Silvia Fangiono dan Martias Fangiono. Silvia and Martias adalah pemilik Ciliandry Angky Abadi.[52]

Keluarga Fangiono mulai berusaha di sektor kayu Indonesia dengan mengoperasikan PT Surya Dumai Industri sebelum beralih ke sektor perkelapasawitan via Ciliandry Angky Abadi, FAP Agri (sebelumnya PT Fangiono Agro Plantation) dan First Resources Limited, yaitu salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara.[54]

Struktur perusahaan di grup keluarga Fangiono sangat tidak transparan, di mana grup tersebut menggunakan perusahaan bayangan dan yurisdiksi kerahasiaan untuk menyembunyikan kepemilikan.[54] Sepertinya hal ini untuk menjauhkan perusahaan andalannya, yakni First Resources dari kegiatan yang tidak mematuhi kebijakan NDPE dan komitmen keanggotaan RSPO. Sebagai contoh, selama First Resources menjadi anggota RSPO dan berkomitmen pada kebijakan NDPE, diperkirakan bahwa FAP Agri dan Ciliandry Angky Abadi sudah membuka 60.000 ha hutan, dan hampir semua anak perusahaan Ciliandry Angky Abadi kecuali satu terlibat dalam konflik dengan masyarakat setempat.54

Terdapat cukup banyak bukti yang menghubungkan Ciliandry Angky Abadi, FAP Agri dan First Resources. Perusahaan tersebut seringkali berbagi sumber daya dan anggota staf.[54] Misalnya, First Resources Limited dimiliki Eight Capital Incorporated[53], yang menyatakan Wirastuty Fangiono sebagai salah satu pemegang saham utama. Meskipun First Resources sudah lebih dari sepuluh tahun membantah adanya hubungan, keterkaitan yang definitif antara First Resources dan FAP Agri sudah terbukti pada bulan Desember 2020 ketika FAP Agri terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Wirastuty Fangiono terungkap sebagai pemilik manfaat FAP Agri.[54] Selain itu, terdapat cukup banyak bukti yang mengkaitkan First Resources dengan Ciliandry Angky Abadi, yang juga dibantah oleh First Resources. Pengaduan terhadap First Resources sedang diajukan melalui RSPO agar Ciliandry Angky Abadi dimasukkan dalam keanggotaan RSPO First Resources.

Kinerja keberlanjutan Ciliandry Angky Abadi buruk, dan selama ini perusahaan tersebut belum berkomitmen pada inisiatif konservasi. Pada bulan Januari 2022, sembilan konsesi Ciliandry Angky Abadi – tiga di Papua dan enam di Kalimantan Tengah – termasuk dalam lebih dari 2.000 izin konsesi yang dibatalkan oleh Presiden Indonesia.[55]

PT Hutan Produksi Lestari

PT Hutan Produksi Lestari adalah konsesi HTI seluas 10.050 ha, dengan 8.736 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa. PT Hutan Produksi Lestari dimiliki pengusaha Indonesia bernama Iman Hartono dan Willem Alexander Hartono. Kedua orang tersebut juga memiliki perusahaan pengolahan kayu bernama PT Prima Parquet Indonesia, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah.[37] Perusahaan tersebut memproduksi kayu lapis dan bahan lantai. Data ekspor Indonesia dari tahun 2020 memperlihatkan bahwa kayu lapis dijual kepada beberapa perusahaan di Singapura, Malaysia dan Korea Selatan.

Baik PT Hutan Produksi Lestari maupun PT Prima Parquet Indonesia belum diketahui ada tidaknya komitmen keberlanjutan. Meskipun sudah mengantongi sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu),[56] pada awal September 2021, kayu yang berasal dari PT Hutan Produksi Lestari dicegat oleh Gubernur Kalimantan Tengah di salah satu pelabuhan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah[57] atas dugaan bahwa sebagian kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen resminya. Namun demikian, hasil penyelidikan belum terungkap sampai sekarang.

Area prioritas untuk konservasi

Belum diketahui apakah ada organisasi konservasi yang bekerja di bentang alam Kahayan-Kapuas, dan informasi tentang sebaran atau keberadaan populasi orang utan masih kurang. Survei sangat perlu untuk dilakukan di daerah ini agar intervensi konservasi yang tepat dapat dikembangkan.

1.

Sebagian besar hutan yang masih tersisa di bentang alam ini terdapat di dalam areal konsesi PT Kalteng Green Resources dan PT Industrial Forest Plantation. Oleh karena itu, intervensi yang paling logis adalah penggunaan areal hutan yang bersebelahan di PT Kalteng Green Resources dan PT Industrial Forest Plantation untuk menciptakan blok hutan yang tidak terganggu untuk pelestarian orang utan (Gambar 15).

Area yang diajukan ini (Gambar 15) mencakup lebih dari 23.000 ha hutan dan meliputi lahan milik PT Industrial Forest Plantation, PT Kalteng Green Resources dan PT Ramang Agro Lestari. Blok hutan di bagian tengah masih dalam keadaan utuh dan tidak dilintasi jalan atau sungai sehingga orang utan dapat bergerak tanpa hambatan.

Namun demikian, blok hutan tersebut dikelilingi jalan, di mana yang paling besar di antaranya melintasi batas timur area yang diajukan dan menghalangi orang utan untuk mencapai Sungai Mangkutup. Belum diketahui apakah orang utan berada di antara sebelah timur jalan tersebut dan Sungai Mangkutup. Apabila ada, maka orang utan bisa terjebak di dalam patch hutan yang kecil ini.

Ke arah selatan area yang diajukan, ada jalan yang melintasi PT Ramang Agro Lestari, namun belum jelas jalan ini berujung di mana dan apakah jalan tersebut melintasi seluruh area konsesi. Di sebelah barat PT Ramang Agro Lestari sudah terjadi pembukaan lahan yang merambah area yang diajukan dari arah barat daya (Gambar 16).

Gambar 15
Potensi intervensi konservasi orang utan di bentang alam Kahayan-Kapuas

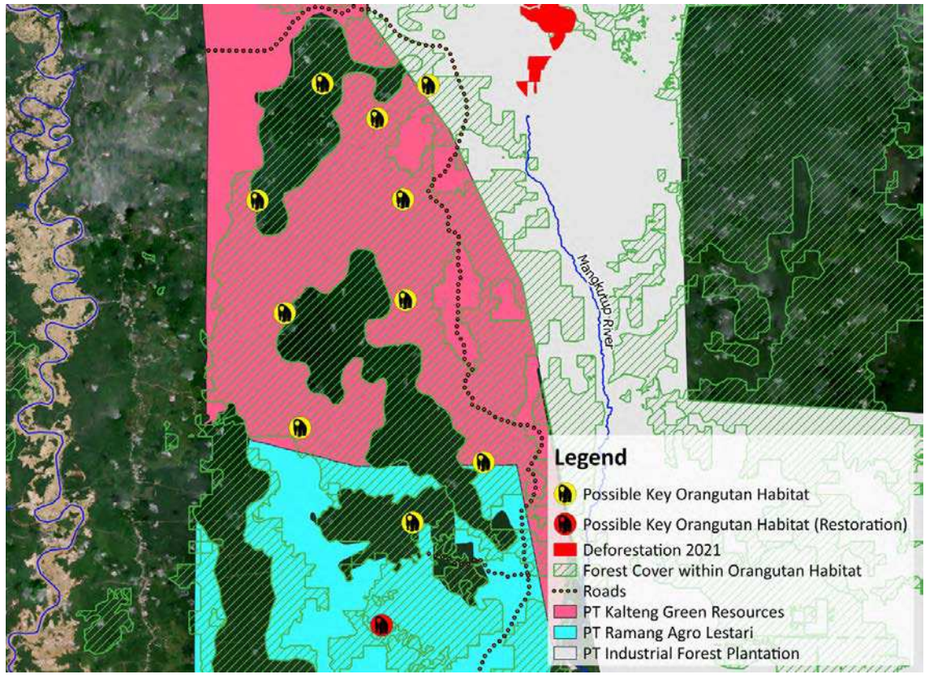

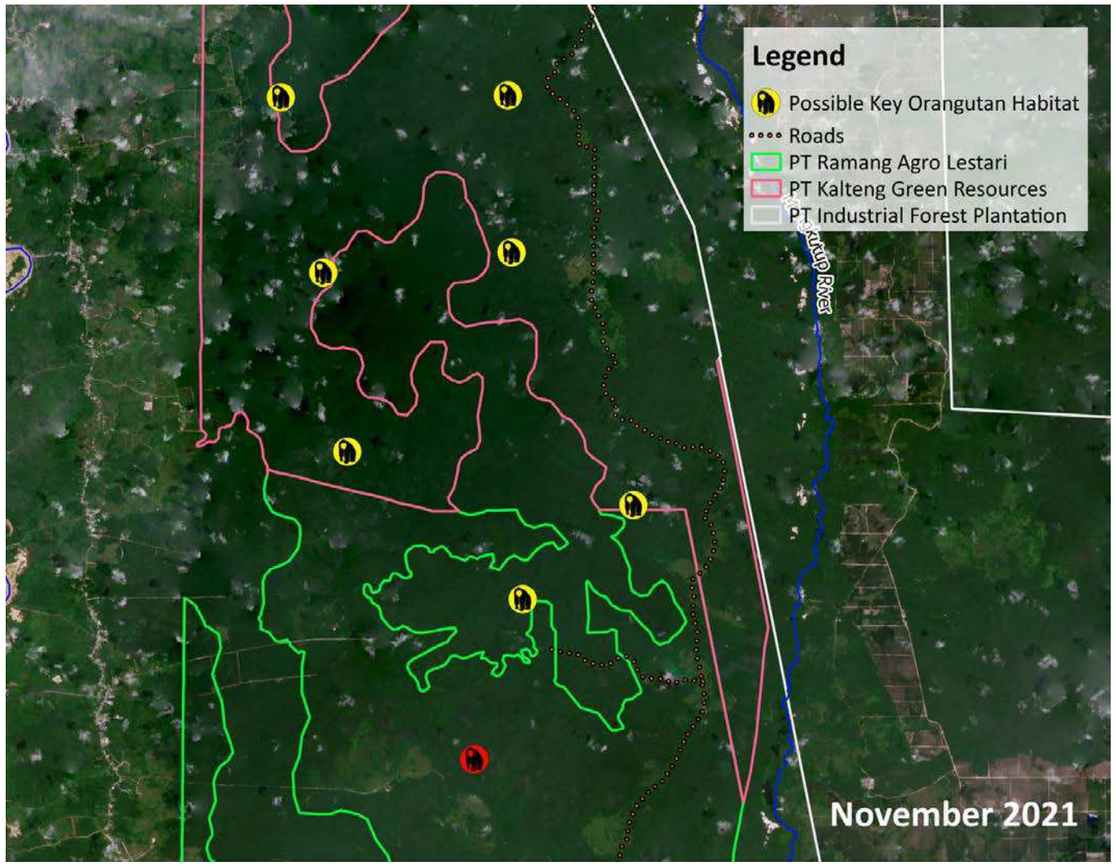

Gambar 16
Potensi intervensi konservasi orang utan di bentang alam Kahayan-Kapuas

2.

Salah satu area yang barangkali cocok untuk intervensi konservasi (Gambar 17) dikelilingi dua jalan, satu sungai ke arah utara dan banyak lahan yang telah dibuka ke arah tenggara di areal PT Industrial Forest Plantation. Ke arah barat, PT Kalteng Green Resources berbatasan dengan areal yang tidak dilindungi di luar konsesi. Areal yang tidak dilindungi tersebut berbatasan dengan PT Bumi Agro Prima. Di dalam zona inti area habitat yang diajukan ini, terdapat beberapa patch hutan terdegradasi yang kecil. Belum jelas apakah jalan yang melintas dari arah utara ke selatan melalui PT Industrial Forest Plantation (Gambar 17) merupakan pelintasan utuh di hutan di area ini, atau apakah bagian barat dan timur PT Industrial Forest Plantation masih tersambung. Apabila jalan tersebut tidak sepenuhnya memisahkan kedua area tersebut, maka area yang diajukan ini dapat diperluas ke bagian tengah dan timur PT Industrial Forest Plantation. Apabila sudah tidak tersambung lagi, maka area-area tersebut tidak mungkin disambungkan tanpa adanya intervensi restorasi.

Area intervensi yang diajukan mencakup sekitar 7.500 ha habitat orang utan bertutupan hutan. Ke arah barat dari PT Kalteng Green Resources, sudah terjadi cukup banyak deforestasi pada tahun-tahun terakhir, dan pada tahun 2021 areal lain sudah dipersiapkan untuk pembukaan lebih lanjut (Gambar 18). Belum jelas pihak mana yang bertanggung jawab atas kegiatan pembukaan ini, karena sebagiannya terdapat di areal di antara PT Kalteng Green Resources dan konsesi perkebunan kelapa sawit di sebelahnya. Sebagian deforestasi tersebut terjadi di dalam batas areal PT Bumi Agro Prima, namun, pola pembukaan lebih menyerupai konsesi HTI, sedangkan PT Bumi Agro Prima adalah areal konsesi perkebunan kelapa sawit.

Gambar 17
Potensi intervensi konservasi orang utan di bentang alam Kahayan-Kapuas

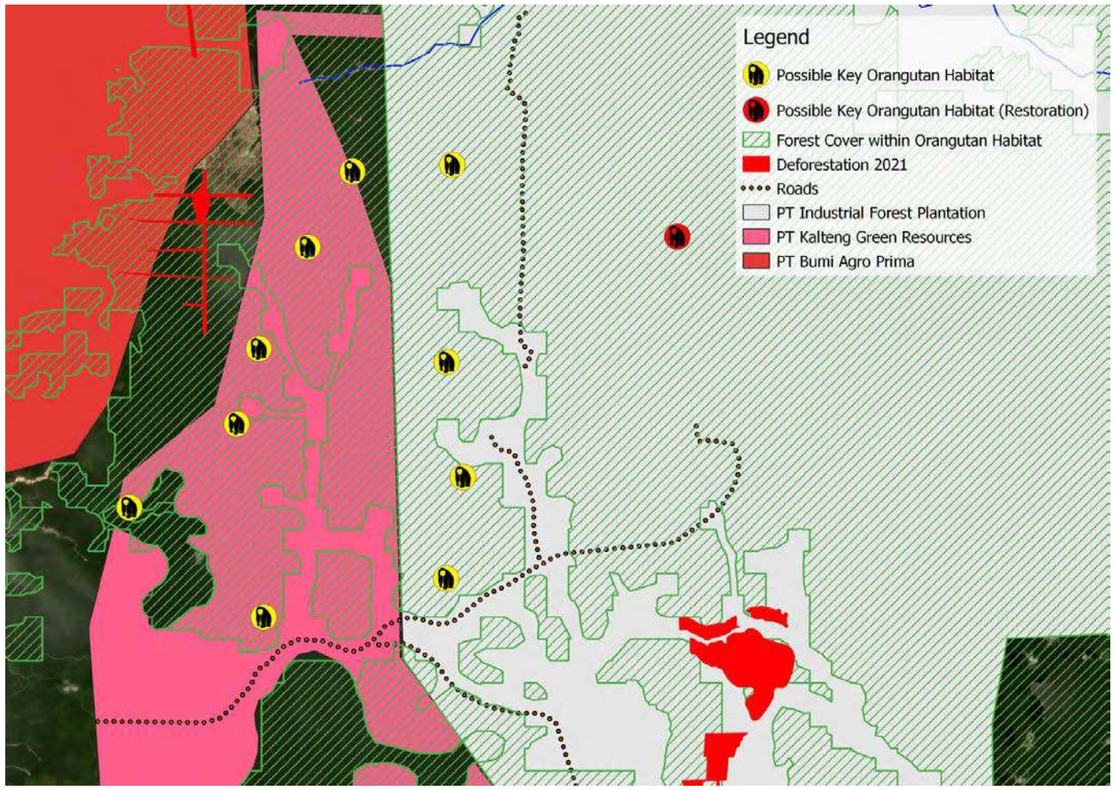

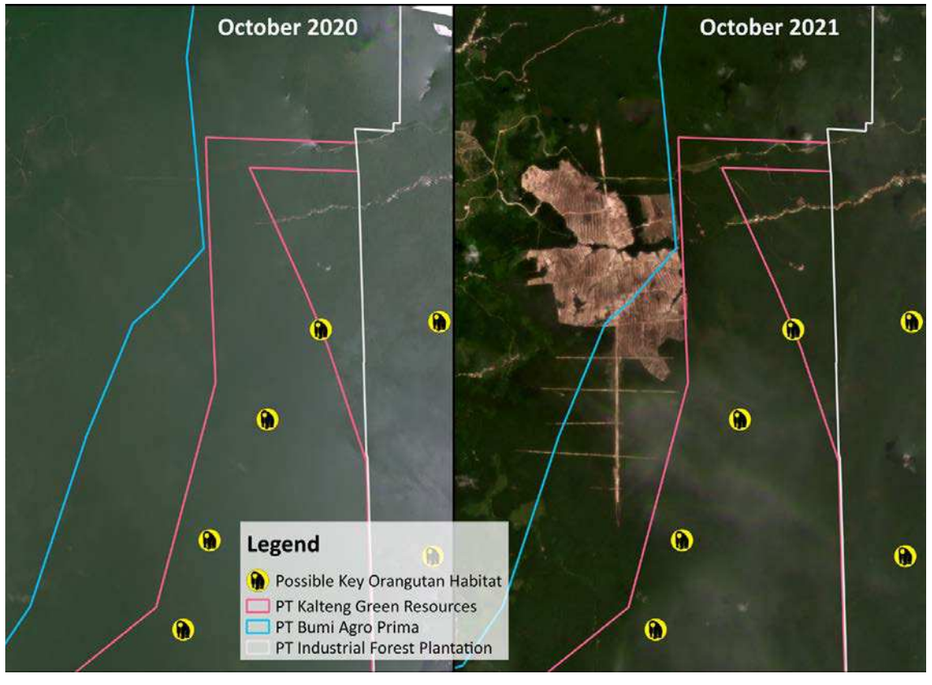

Gambar 18
Potensi intervensi konservasi orang utan di bentang alam Kahayan-Kapuas

Bentang alam Kubu Raya

Gambar 19
Konsesi HTI di bentang alam Kubu Raya

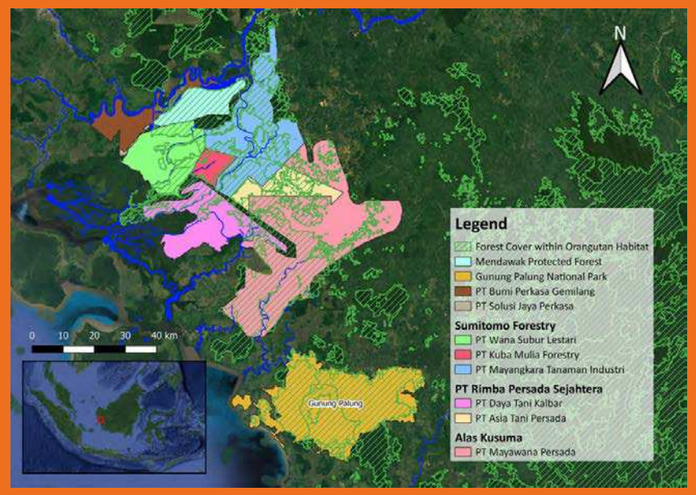

Taman Nasional Gunung Palung adalah salah satu habitat terpenting bagi orang utan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas kawasan mencapai 108.000 ha, sekitar 2.500 ekor orang utan hidup di dalam areal hutan seluas 90.000 ha di dalam taman nasional tersebut. Berbeda dengan kawasan Gunung Palung, bentang alam yang terletak di sebelah utara bernama Kubu Raya kurang diperhatikan untuk kelestarian meskipun sangat berpotensi untuk konservasi orang utan. Luas bentang alam Kubu Raya mencapai 284.481 ha, dan walau sebagian besar bentang alam ini belum disurvei, populasi orang utan diduga dapat mencapai sebanyak 1.348 ekor.[2] PHVA menyatakan bahwa kelayakan populasi orang utan di Kubu Raya cukup baik, tetapi sedang berkurang.[2]

Analisis Aidenvironment mengindikasikan bahwa habitat orang utan bertutupan hutan di bentang alam Kubu Raya mencapai 223.014 ha (Gambar 19), lebih dari dua kali lipat luas kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Hampir keseluruhan bentang alam ini tercakup oleh delapan konsesi perusahaan dan baru satu areal lindung, yaitu kawasan Hutan Lindung Mendawak seluas 20.000 ha (Gambar 19). Di atas kertas, kawasan Hutan Lindung Mendawak menyediakan habitat yang paling layak bagi orang utan di bentang alam ini. Namun, hutannya sudah terdampak berat oleh kegiatan pembalakan liar. Juga terdapat informasi yang bertentangan mengenai keberadaan orang utan di kawasan ini.[58] Survei lapangan yang dilakukan oleh WWF Indonesia pada tahun 2020 mengindikasikan keberadaan orang utan di kawasan, namun hal ini masih diperdebatkan oleh beberapa pihak.[59] Berdasarkan engagement oleh Aidenvironment di area ini, kami percaya bahwa orang utan tidak ada di dalam kawasan Hutan Lindung Mendawak. Namun demikian, kawasan tersebut dapat dijadikan lokasi yang cocok untuk melepasliarkan orang utan di masa mendatang. Dipahami bahwa proyek Integrated Sustainable Landscape (ISLA) yang dilaksanakan oleh IDH dan Kemitraan bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di bentang alam ini, namun belum ada banyak informasi tentang proyek tersebut. Selain itu, WWF Indonesia sedang mengembangkan rencana konservasi untuk bentang alam ini, namun rencana ini belum terbit.

Jalan logging di Hutan Lindung Mendawak
© Aidenvironment

PT Mayawana Persada milik Alas Kusuma

Dengan areal seluas 137.000 ha, PT Mayawana Persada merupakan konsesi HTI dengan paling banyak habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di Indonesia seluas 68.776 ha. Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, konsesi ini merupakan habitat orang utan bertutupan hutan utuh yang terbesar di bentang alam Kubu Raya (Gambar 19).

Berdasarkan engagement Aidenvironment di area ini, kami mengetahui keberadaan orang utan setidaknya di dua lokasi di sepanjang batas timur areal konsesi PT Mayawana Persada, namun ukuran populasi ini dan luas wilayah jelajahnya belum diketahui. Meskipun demikian, informasi mengenai kegiatan konservasi di PT Mayawana Persada sangat kurang dikarenakan ketidaktransparanan, baik dari PT Mayawana Persada maupun dari perusahaan induknya, Alas Kusuma. Saat ini, masih belum jelas berapa ekor orang utan yang ada di PT Mayawana Persada, berapa luasnya areal hutan yang ditetapkan untuk pembukaan maupun perlindungan, maupun apakah perusahaan ini mempunyai kebijakan untuk melindungi orang utan.

Keberadaan orang utan juga diketahui di setiap konsesi di sekelilingnya dan di jalur hutan sempit yang tidak dibebani izin di antara PT Mayawana Persada dan PT Asia Tani Persada (Gambar 19). Oleh karena itu, maka pantas diasumsikan bahwa bisa saja ada populasi orang utan yang lumayan besar di dalam blok inti seluas 68.776 ha di PT Mayawana Persada. Semua ini dilatarbelakangi deforestasi yang semakin meningkat di konsesi ini, di mana 5.250 ha habitat orang utan dibuka selama tahun 2021 saja (Gambar 20). Hal ini memperlihatkan betapa besarnya ancaman terhadap orang utan di areal ini dan mengapa PT Mayawana Persada harus langsung menghentikan kegiatan pembukaan lahan dan melakukan survei orang utan di areal konsesinya. Berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, sepertinya habitat orang utan di areal konsesi ini dan populasi yang barangkali ada di dalamnya dihadapi ancaman serius.

Dokumen audit terbaru (September 2020) yang diinstigasi Pemerintah Indonesia tentang pengelolaan berkelanjutan oleh PT Mayawana Persada tidak memberikan banyak informasi mengenai upaya konservasi.[61] Pada tahun 2014, penilaian NKT dilakukan terhadap konsesi ini dan diajukan ke HCV Resource Network untuk dilakukan proses penelaahan sejawat oleh PT Hatfield Indonesia.[60] Waupun penilaian tersebut tidak tersedia untuk umum, berita di media massa tentang penilaian ini mengklaim bahwa 66.900 ha hutan di areal perusahaan ini dianggap bernilai konservasi tinggi, tetapi baru 20.700 ha saja yang ditetapkan sebagai areal lindung.[61] Aidenvironment berhasil mengakses dokumen penilaian penelaahan sejawat terhadap penilaian NKT PT Mayawana Persada. Dalam dokumen tersebut terungkap sejumlah masalah dengan penilaian pertamanya, terutama ketidakjelasan mengenai bagian mana di areal konsesi yang bernilai konservasi tinggi, dan bagian mana yang ditetapkan untuk kegiatan pembukaan. Oleh karena itu, penelaahan sejawat tersebut merekomendasikan agar seluruh kegiatan pembukaan di konsesi dihentikan sampai hal ini sudah dijelaskan dengan baik. Masalah lainnya dengan penilaian pertama adalah tidak adanya rencana pengelolaan, hanya anjuran generik, dan belum jelasnya apakah metodologi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dituruti atau tidak.

Audit terbaru PT Mayawana Persada tidak menyinggung keberadaan orang utan maupun kebijakan perusahaan terkait orang utan, namun di audit tersebut dinyatakan bahwa kegiatan operasional di areal konsesi tidak didasarkan pada rencana tata ruang yang divalidasi sebagaimana disyaratkan untuk perolehan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) nya.[61] Hal ini berarti terdapat kemungkinan besar bahwa lokasi penanamannya tidak sesuai dengan temuan dalam penilaian NKT.

Deforestasi di PT Mayawana Persada

Dari tahun 2018 sampai 2021, pembukaan hutan di areal perusahaan ini mencapai 8.852 ha (Gambar 20), di mana sebagian kecil disebabkan oleh kegiatan pertambangan bauksit oleh pihak ketiga. Selama periode tersebut, deforestasi yang paling agresif, yaitu seluas 5.250 ha, terjadi pada tahun 2021.

Gambar 20
Deforestasi seluas 8.852 ha dari tahun 2018 sampai 2021 di PT Mayawana Persada
Citra satelit dari bulan Oktober 2021
(Sumber: Planet)

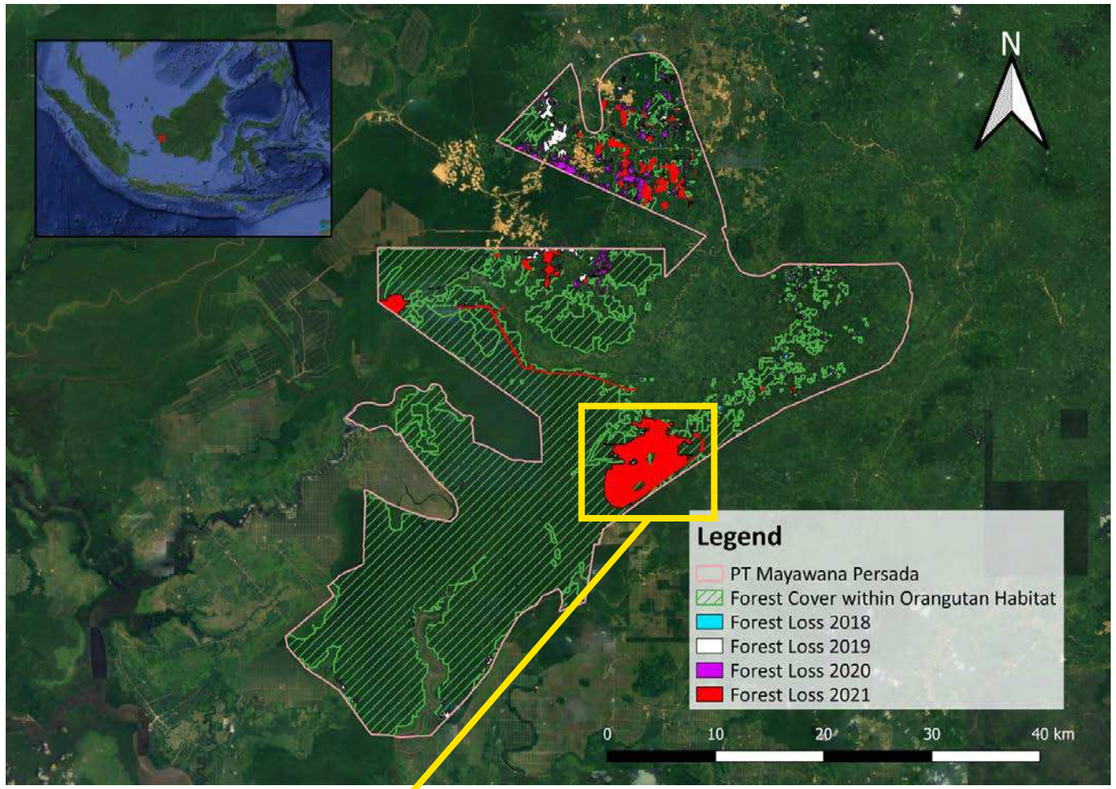

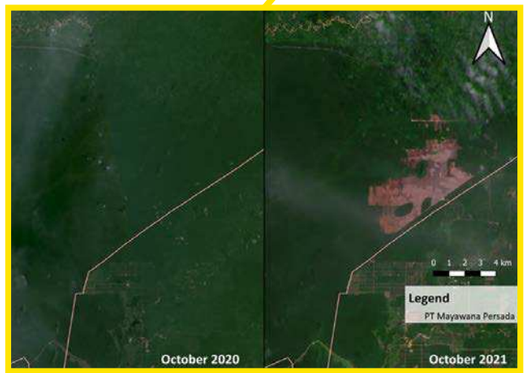

**** Bagian dari Gambar 20**
Sekitar 2.137 ha deforestasi di habitat orang utan di bagian selatan PT Mayawana Persada
(Sumber: Planet)

Gambar 21
Deforestasi di dalam areal PT Mayawana Persada
(Sumber: Aidenvironment)

Gambar 22
Deforestasi di dalam areal PT Mayawana Persada
(Sumber: Aidenvironment)

PT Mayawana Persada membantah adanya kegiatan pembukaan hutan. Dalam surel yang dikirim ke Mongabay, seorang wakil perusahaan menyatakan: “Tidak ada kegiatan deforestasi di habitat orang utan oleh PT Mayawana Persada. Hal ini bisa dilihat dari peta kerja perusahaan dan kegiatan perusahaan di lapangan yang sudah memperhatikan hasil studi terhadap orang utan dan areal nilai konservasi tinggi.” PT Mayawana Persada menyatakan bahwa studi tersebut dilakukan oleh konsultansi bernama Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop).[62] Namun, analisis satelit dan drone oleh Aidenvironment memperlihatkan bahwa beberapa area NKT memang sudah dibuka (Gambar 21 dan 22).

Gambar 23
Regenerasi hutan tanaman tahap awal setelah deforestasi yang terjadi baru-baru ini di PT Mayawana Persada
(Sumber: Aidenvironment)

> ‘Alas Kusuma tidak mempunyai situs web, dan sepertinya tidak mempunyai kebijakan NDPE grup.’

Alas Kusuma Group

Alas Kusuma, yang memiliki PT Mayawana Persada, adalah grup perusahaan Indonesia yang mengoperasikan konsesi penebangan kayu, perkebunan kelapa sawit dan HTI. Meskipun sudah beroperasi sejak tahun 1970an, Alas Kusuma masih kurang transparan, tidak mempunyai situs web, dan sepertinya tidak mempunyai kebijakan NDPE grup. Dalam penilaian SPOTT (Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit) yang terbaru, Alas Kusuma diberi skor di kisaran yang sangat rendah, yaitu sebesar 10.6% saja.[63] Grup ini, yang paling terkenal karena usaha kayu lapisnya, mempunyai 455.000 ha konsesi penebangan kayu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dua anak perusahaan Alas Kusuma yang bergerak di bidang pembalakan, yakni PT Sari Bumi Kusuma and PT Suka Jaya Makmur, memegang sertifikat FSC.[64] Selain sertifikasi FSC, PT Suka Jaya Makmur bekerjasama dengan WWF Indonesia untuk memonitor dan melestarikan orang utan di areal konsesinya.[65]

PT Mayangkara Tanaman Industri, PT Wana Subur Lestari dan PT Kubu Mulia Forestry

Konsesi dengan habitat orang utan bertutupan hutan terbesar kedua yang masih tersisa di bentang alam Kubu Raya dan terbesar keempat antara semua konsesi HTI di Indonesia, adalah PT Mayangkara Tanaman Industri dengan areal seluas 39.716 ha. Perusahaan ini dan dua perusahaan lain di bentang alam bernama PT Wana Subur Lestari dan PT Kubu Mulia Forestry dimiliki Sumitomo Forestry. PT Wana Subur Lestari dan PT Kubu Mulia Forestry masing-masing mempunyai 16.899 dan 2.243 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa.

Sepertinya, Sumitomo Forestry mempunyai program konservasi yang paling maju di bentang alam ini. PT Mayangkara Tanaman Industri melakukan survei populasi orang utan setiap dua tahun sekali di dalam areal konservasinya yang seluas 12.318 ha, namun hasil survei tidak tersedia. Perusahaan tersebut juga melakukan survei habitat secara rutin di areal konservasinya dan kegiatan pengelolaan air di konsesinya untuk mencegah penurunan permukaan tanah dan mengurangi resiko kebakaran. Dalam wawancara media massa pada tahun 2020, Presiden Direktur PT Mayangkara Tanaman Industri dan PT Wana Subur Lestari, Tsuyoshi Kato[66] menyatakan bahwa terdapat [70] ekor orang utan di PT Mayangkara Tanaman Industri.[67] Populasi di areal konservasinya meningkat, dan perangkap kamera yang dipasang pada tahun 2019 telah menghasilkan video orang utan betina dengan anak barunya. Sumitomo Forestry membenarkan pada Aidenvironment bahwa orang utan tidak ada di 16.899 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa di PT Wana Subur Lestari. PT Kubu Mulia Forestry juga tidak ada orang utan.

Sumitomo Forestry menyatakan bahwa, “Untuk orang utan, PT Wana Subur Lestari dan PT Mayangkara Tanaman Industri sudah menetapkan areal konservasi di sekitar habitat yang sudah ada yang disebut “zona inti” dan berfokus pada kegiatan patroli keseluruhan zona inti”.60 Kemudian, “koridor hijau” di sempadan sungai dan bakau yang selebar 300 sampai 500 meter menghubungkan zona inti ini dengan habitat penting lainnya. Kedua zona inti yang teridentifikasi adalah kawasan Hutan Lindung Mendawak dan areal konservasi di bagian timur laut PT Mayangkara Tanaman Industri. Sumitomo Forestry secara publik meragukan keberadaan orang utan di kawasan Hutan Lindung Mendawak sehingga peran koridor hijau ini dalam konservasi orang utan masih belum jelas. Namun demikian, terindikasi oleh lokasi zona inti di PT Mayangkara Tanaman Industri dan tidak adanya orang utan di PT Wana Subur Lestari dan PT Kubu Mulia Forestry bahwa sebagian besar orang utan terdapat di bagian paling timur di bentang alam ini.

Areal konservasi di PT Mayangkara Tanaman Industri yang menampung sekitar 70 ekor orang utan.
© Aidenvironment

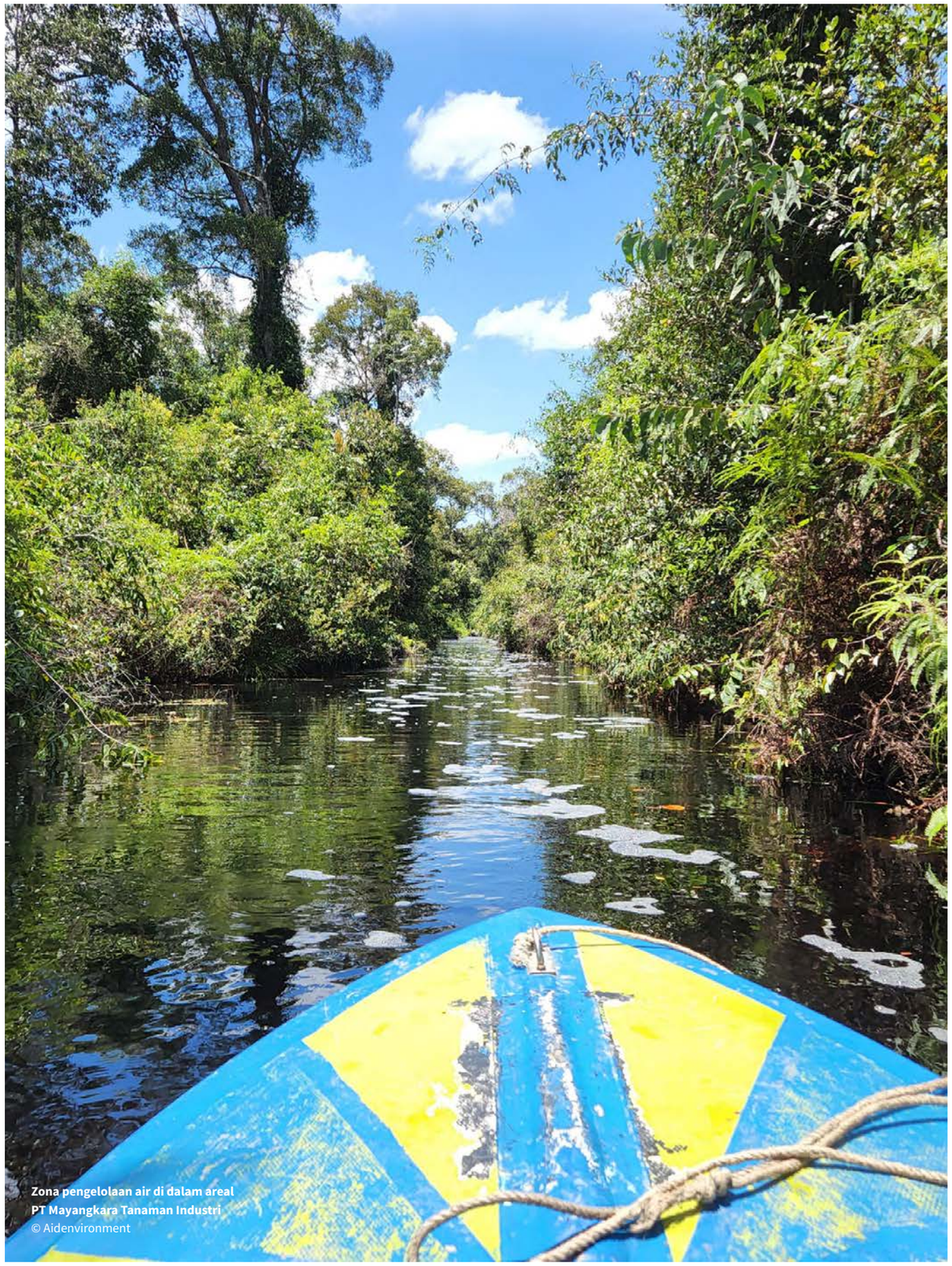

Zona pengelolaan air di dalam areal PT Mayangkara Tanaman Industri
© Aidenvironment

Areal konservasi di PT Mayangkara Tanaman Industri dan perangkap kamera di dalam areal konservasi.
© Aidenvironment

PT Asia Tani Persada

Beberapa "Koridor hijau" di PT Mayangkara Tanaman Industri menurun ke arah selatan ke dalam areal konsesi PT Asia Tani Persada. PT Asia Tani Persada dimiliki PT Rimba Persada Sejahtera dan dioperasikan oleh mantan anggota staf Sinar Mas. PT Asia Tani Persada adalah salah satu perusahaan pemasok Sinar Mas.[68] Menurut hasil PHVA, terdapat lebih dari 150 orang utan di dalam dan sekitar PT Asia Tani Persada.[2] Konsesi tersebut mempunyai 8.665 ha habitat orang utan bertutupan hutan, dan keberadaan orang utan dibenarkan dalam audit terbaru perusahaan ini.[70] Meskipun demikian, laporan ringkas penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk PT Asia Tani Persada tidak mengacu pada keberadaan orang utan di dalam areal konsesinya.[70]

PT Asia Tani Persada diketahui sedang melaksanakan penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) yang akan rampung pada tahun 2023. Aturan penilaian SKT menyatakan bahwa pengembangan lahan tidak diperkenankan sebelum penilaian SKT sudah ditelaah sejawat dan diterima secara resmi. Oleh karena itu, orang utan yang ada di konsesi ini seharusnya terjaga dari gangguan untuk sementara waktu dan seharusnya dilindungi oleh proses SKT. Namun demikian, di dalam areal konsesi ini juga terdapat area seluas 930 ha yang dioperasikan oleh PT Karya Utama Tambang Jaya untuk kegiatan pertambangan bauksit.[70] Citra satelit memperlihatkan bahwa PT Karya Utama Tambang Jaya sudah merambah areal konsesi PT Asia Tani Persada.

PT Daya Tani Kalbar

Ke arah barat PT Asia Tani Persada dan terpisah oleh lahan sempit yang membentang di luar konsesinya terdapat areal konsesi lain milik PT Rimba Persada Sejahtera yang juga memasok APP bernama PT Daya Tani Kalbar. Konsesi ini mempunyai 15.341 ha habitat orang utan bertutupan hutan yang masih tersisa. Dokumen ringkasan publik PT Daya Tani Kalbar membenarkan keberadaan orang utan di dalam areal konsesinya.[69] Di sebelah timur laut PT Daya Tani Kalbar, di antara konsesi tersebut dan areal konsesi PT Mayawana Persada, PT Asia Tani Persada dan PT Mayangkara Tanaman Industri terdapat bentang lahan sempit. Survei sarang yang dilakukan oleh International Animal Rescue dan Borneo Nature Foundation di bentang alam pada tahun 2015 menemukan 90 sarang orang utan di bentang lahan tersebut.

Area prioritas untuk konservasi

Di bentang alam Mendawak, deforestasi dan sungai besar menjadi hambatan yang paling signifikan terhadap pergerakan orang utan. Orang utan, terutama yang membawa anak, cenderung menghindari lahan terbuka karena sangat rentan diburu. Meskipun orang utan tidak dapat berenang, mereka berani mengarungi badan air, terutama kalau tidak ada jalur penyeberangan di pepohonan.

Berdasarkan hal tersebut, area fokus yang paling penting di unit habitat Mendawak adalah sebagai berikut:

1.

PT Daya Tani Kalbar sampai kawasan Hutan Lindung Mendawak, melalui PT Mayangkara Tanaman Industri, PT Kubu Mulia Forestry dan PT Wana Subur Lestari: Terdapat hutan utuh yang membentang antara PT Daya Tani Kalbar dan kawasan Hutan Lindung Mendawak dan melintasi tiga areal konsesi Sumitomo Forestry di bentang alam ini (Gambar 24). Mulai di PT Daya Tani Kalbar, hutan tersebut melintasi sempadan utara Sungai Mendawak di bagian utara PT Daya Tani Kalbar dan Kali Cimanuk di sebelah barat PT Mayangkara Tanaman Industri. Kemudian, hutan mengarah ke utara melalui PT Kubu Mulia Forestry dan PT Wana Subur Lestari sebelum berakhir di kawasan Hutan Lindung Mendawak (Gambar 24). Meskipun terdapat satu sungai di antara PT Wana Subur Lestari dan Hutan Lindung Mendawak, masih terdapat kemungkinan bahwa orang utan bisa menyeberang menggunakan pohon yang menjorok di atasnya.

Di dalam area hutan ini, PT Daya Tani Kalbar sudah membenarkan keberadaan orang utan di dalam areal konsesinya.[70] Tidak ada orang utan di PT Wana Subur Lestari atau PT Kubu Mulia Forestry, dan PT Mayangkara Tanaman Industri menyatakan bahwa orang utan hanya hidup di sebelah timur Kali Cimanuk. PT Mayangkara Tanaman Industri juga menyatakan bahwa tidak ada orang utan di kawasan Hutan Lindung Mendawak. Apabila terdapat orang utan di bagian utara PT Daya Tani Kalbar dan kawasan Hutan Lindung Mendawak, maka koridor hutan ini merupakan satu-satunya jalur penghubung di antara kedua populasi tersebut. Hutan ini membentang sekitar 36.000 ha.

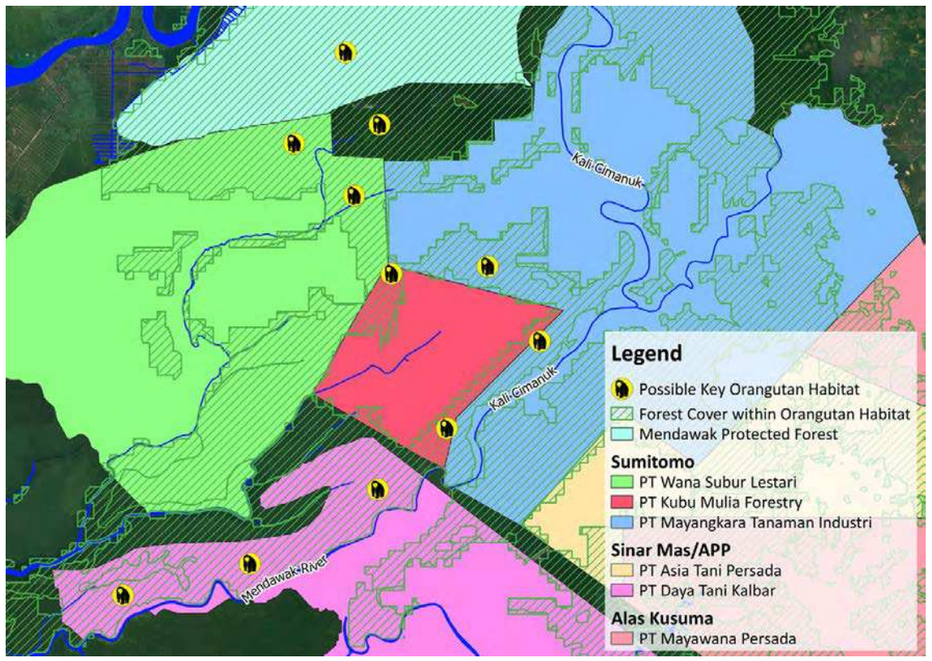

Gambar 24
Potensi area prioritas untuk konservasi orang utan di bentang alam Kubu Raya

2.

Bagian barat dan barat daya PT Mayawana Persada dan jalur hutan di antara PT Daya Tani Kalbar, PT Mayangkara Tanaman Industri, PT Asia Tani Persada dan PT Mayawana Persada: Terdapat sekitar 38.000 ha hutan yang membentang dari area pesisir di pinggiran PT Mayawana Persada sampai jalur hutan sempit di antara PT Mayawana Persada dan PT Daya Tani Kalbar (Gambar 25). Dari kawasan pesisir, orang utan dapat bergerak melalui PT Mayawana Persada sepanjang sempadan sungai di sebelah utara Sungai Simpang sampai kanal drainase di PT Mayawana Persada menghambat pergerakan lebih jauh ke arah utara. Terdapat beberapa sungai kecil di dalam blok hutan ini, namun orang utan masih dapat menyeberang menggunakan pohon yang menjorok di atasnya.

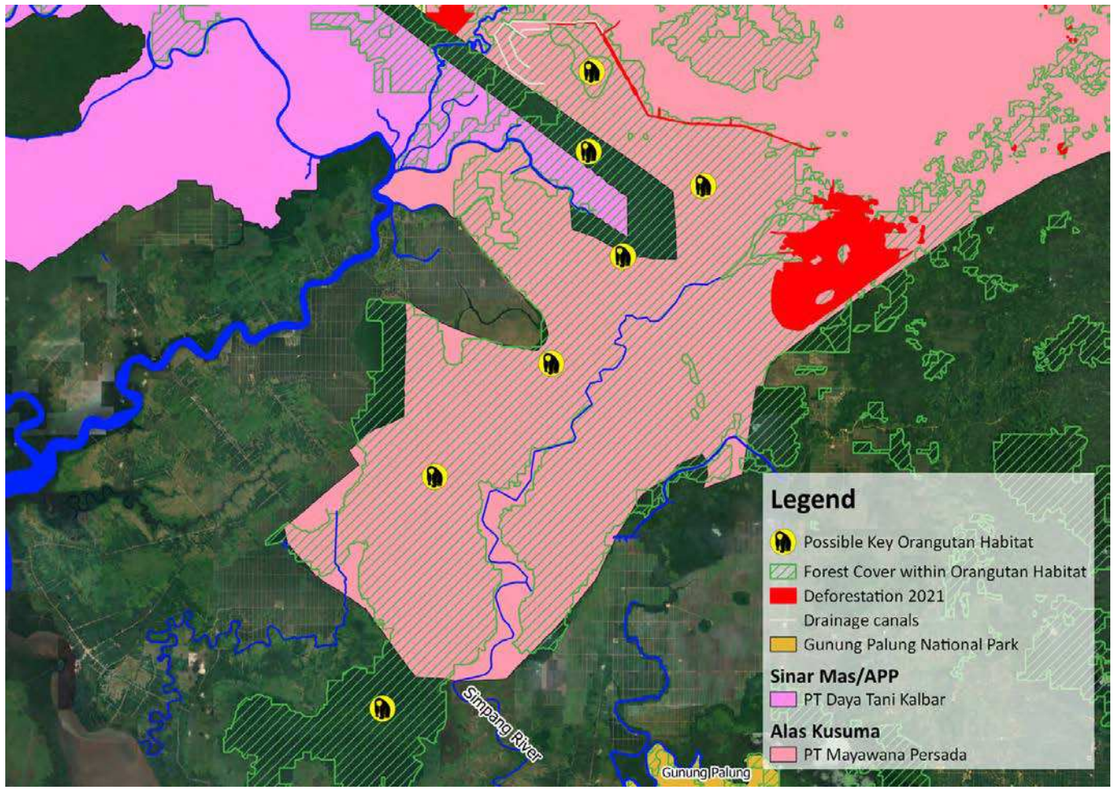

Sungai utama yang melintasi PT Mayawana Persada adalah Sungai Simpang yang membelah konsesi menjadi dua bagian. Meskipun sungai ini tidak lebar, kurang dari 10 meter di beberapa bagian, sebagian besar areal ripariannya sudah terdegradasi berat. Survei lanjutan akan diperlukan, namun terdapat kemungkinan bahwa orang utan dapat menyeberang aliran air ini.

Gambar 25
Potensi area prioritas untuk konservasi orang utan di bentang alam Kubu Raya

Referensi

1. The IUCN Red List of Threatened Species 2016, Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S., Pongo pygmaeus, Pongo abelii, Pongo tapanuliensis, 2016, https://bit.ly/3J01tjX
2. Utami-Atmoko, S. Traylor-Holzer, K. Rifqi, M.A., Siregar, P.G., Achmad, B., Priadjati, A., Husson, S., Wich, S., Hadisiswoyo, P., Saputra, F., Campbell-Smith, G., Kuncoro, P., Russon, A., Voigt, M., Santika, T., Nowak, M., Singleton, I., Sapari, I., Meididit, A., Chandradewi, D.S., Ripoll Capilla, B., Ermayanti, Lees, C.M. (eds.) 2017. Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN, https://bit.ly/34sABty
3. Knott, C., Emery Thompson, M. and Wich, S., 2008. The ecology of female reproduction in wild orangutans. Orangutans, pp.171-188. https://bit.ly/34vbuGU
4. Aidenvironment, The need for cross-commodity no-deforestation policies by the world's palm oil buyers, August 2021. https://bit.ly/3HoMob5
5. Orangutan Foundation UK. https://bit.ly/3w7A6Be
6. Indonesian Orangutan Foundataion (YAYORIN). https://bit.ly/34H133c
7. KTH company website, https://bit.ly/3IV722Q.
8. Sinar Mas, Aidenvironment, Earthqualizer Foundation, 2020. Study Report: Verification of land fire in the concession area of PT Arrtu Energi Resources, https://bit.ly/3ofleMr\
9. Eagle High Plantations, Six-Month Report Project Amour, 2018. https://bit.ly/3AX66II
10. PT Suka Jaya Makmur website, https://bit.ly/3oirJOx.
11. WWF, 2015. Upswing in the world's largest orangutan population. https://bit.ly/3HmBr9X.
12. WWF, 2013. PT. Dwimajaya Utama in the Heart of Borneo (HoB) receives FSC certification. https://bit.ly/3HfdXn8.
13. Partnerships for Forests, 2019. Eagle High commits 25 years of conservation funding in Central Kalimantan. https://bit.ly/3oc0rcs.
14. Partnerships for Forests website, https://bit.ly/3AONcna [Accessed 10 November 2021].
15. Golden Agri Resources, 2018. Golden Agri-Resources and OFI continue collaboration to release orangutans and educate people about orangutan conservation. https://bit.ly/3ANIZA9.
16. Sawit Subermas Sarana website, https://bit.ly/3ggzCzq [Accessed 15 November 2021]
17. Gokkon, B., 2017. Alarms raised as timber firm said to pierce one of Indonesia's last orangutan strongholds. Mongabay Environmental News. https://bit.ly/3sc9BXP.
18. Suwastoyo, B., 2018. Overlapping Concessions Jeopardize Borneo Orangutan Corridor - The Palm Scribe, The Palm Scribe, https://bit.ly/3Gx4pmc.
19. Burhani, R. (2011). Konservasi hutan lindung Ketapang terancam eksplorasi pertambangan. Antara News. https://bit.ly/3sm4q7z.
20. HCV areas being destroyed by bauxite mining company. Foresthints News. (2018), https://bit.ly/3uwyY9p.
21. Bumitama Agri Ltd. "KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL" AREAS CLEARED FOR ROAD DEVELOPMENT. (2018), https://bit.ly/3Lq4UlY.
22. 50 Years in the Field – Official Orangutan Foundation International Site. Official Orangutan Foundation International Site. (2021), https://bit.ly/3Lhcuiq.
23. RSPO NOTIFICATION OF PROPOSED NEW PLANTING. Rspo.org. (2014), https://bit.ly/3AZW8Gs.
24. Butler, R. (2013). Greenpeace photos expose palm oil giant's deforestation in Indonesia. Mongabay Environmental News, https://bit.ly/3GCcjux.
25. Complaint. Askrspo.force.com. (2013), https://sforce.co/35JZOjW.
26. Parker, D. (2013). Palm oil company Bumitama under fire for clearing rainforest, endangering orangutans. Mongabay Environmental News, https://bit.ly/3uwdB84.
27. Butler, R. (2014). Procter & Gamble's palm oil suppliers linked to deforestation (photos). Mongabay Environmental News, https://bit.ly/3LhQHYf.
28. Askrspo.force.com. 2012. https://sforce.co/3spdkRB.
29. Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Forest Peoples Programme. (2020). Preliminary findings from a Review of the Jurisdictional Approach initiative in Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia. Forest Peoples Programme, https://bit.ly/3GBy0Lo.
30. InfiniteEARTH Rimba Raya Biodiversity Reserve Project. (2011). Rimba Raya Biodiversity Reserve Project. PT Rimba Raya, https://bit.ly/34DLJnR
31. Direct and Indirect Suppliers Grievances. LDC.com. (2021), https://bit.ly/3Hx05F6.
32. InfiniteEARTH Rimba Raya Biodiversity Reserve Project Fact Sheet. (2016). Rimba Raya Biodiversity Reserve Project. PT Rimba Raya, https://bit.ly/34DLJnR
33. Aidenvironment (2021). The Industrial Tree Plantations of the Nusantara Fiber Group. https://bit.ly/37EirqJ
34. PT Marubeni website. https://bit.ly/3tcXZW7
35. Chain Reaction Research, NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 78%, 2 June 2020, bit.ly/38XvjGM. Calculated from data used for the report
36. Trase Insights (2021). Trase website. Indonesia Pulp Sector's Progress on Deforestation Hangs in the Balance. https://bit.ly/3I9YgNT
37. Aidenvironment (2021). Four Indonesian Pulp and Paper Companies Responsible for 11,000 Hectares of Forest Loss in 2021. https://bit.ly/3tfhz4a
38. Borneo Foundation Website. (2022). Rungan Landscape. https://bit.ly/3rvpKIG
39. Save the Orangutan Website (2018). Rungan River: 'New Land' for Save the Orangutan. https://bit.ly/35Ve0XQ
40. Holzhacker, R. L., & Tan, W. G. Z. (Eds.). (2021). Challenges of Governance: Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN. Springer Nature, https://bit.ly/3orA6as
41. Chain Reaction Research (2020). The Chain: PT Pradiksi Gunatama's IPO Raises Risk of Further Deforestation. https://bit.ly/34F2bEa
42. Mongabay (2018). Jong, H. Indonesia to investigate death of journalist being held for defaming palm oil company, https://bit.ly/34CT9aM
43. Hidayat, M. (2021). VIDEO Pabrik Biodiesel Jhonlin di Kabupaten Tanbu Kalsel Akan Diresmikan Presiden, Banjarmasin Post, https://bit.ly/3B4aNQU
44. SVLK (2014). Studi Independen Terhadap Sertifikasi: Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia. https://bit.ly/37rde5b
45. Metro Online (2021). Yuk... Mengenal Lebih Dekat Dr. Suheldi, SE, MM, Balon Walikota Binjai. https://bit.ly/3uuOqD1
46. Pirard, R., Cossalter, C. (2006). The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia's Kalimantan Provinces. https://bit.ly/3w9SYzt
47. Murdiyarso, D., & Lebel, L. (2007). Southeast Asian fire regimes and land development policy. In Terrestrial ecosystems in a changing world (pp. 261-271). Springer, Berlin, Heidelberg. https://bit.ly/3B1Duhg
48. Provinsi Kalimantan Tengah - PDF Free Download. Docplayer.info, https://bit.ly/3Jas11W
49. Trustindo Certification, Resume of PHPL (sustainable management of production forest) performance assessment, PT Industrial Forest Plantation, 24 June 2019, bit.ly/338FAfz
50. Trustindo Certification, Resume of PHPL (sustainable management of production forest) performance assessment, PT Industrial Forest Plantation, 17 July 2020, bit.ly/3b8VLy
51. Aidenvironment (2021). The Industrial Tree Plantations of the Nusantara Fiber Group. https://bit.ly/37EirqJ
52. Mighty Earth, MapHubs, Waxman (2021). Rapid Response Palm Oil Report 33. https://bit.ly/3Jaz9vi
53. Musim Mas Website, Bumi Agro (Bumi Agro Prima) – Bumi Gading Prima (Bahasa) - Musim Mas, https://bit.ly/3ouYbgE
54. MacInnes, Angus. (2021). Forest Peoples Programme. First Resources: Hiding in the shadows? Oil Palm Group linked to 'shadow companies' that are devastating Kalimantan's forests and peoples with impunity, https://bit.ly/3B0xrcY
55. Eight Capital Inc. (2014). Form For Substantial Shareholder(s)/Unitholder(s) in Respect of Interests In. https://bit.ly/3gsAW2a
56. IDX. (2020). PT FAP AGRI TBK Prospektus, https://bit.ly/3HLrIKo
57. Mongabay (2022). KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN (2022). Indonesia, https://bit.ly/3ovETYw
58. PT Hutan Produksi Lestari SVLK Audit Borneo. Wana Indo Website. https://bit.ly/3JwQ9fT
59. Kumparan Website (2021). Diduga Ilegal, Ribuan Kayu Log di Kalteng Disegel Dinas Kehutanan, https://bit.ly/3owwX9f
60. Kato, T., Silsigia, S., Yusup, A. A., & Osaki, M. (2021). Coexistence of Humans and Nature in Tropical Peatlands. In Tropical Peatland Eco-management (pp. 135-161). Springer, Singapore. https://bit.ly/336qKJS
61. PT Ayamaru 2021. Pengumuman Hasil Audit PHPLV Penilaian IUPHHK HTI PT Mayawana Persada, https://bit.ly/3gKH9Hf
62. HCV Resource Network, 2014. Annual Report 2014. [online] HCV Resource Network. https://bit.ly/3gtFAx3
63. Harfenist, E., 2014. Huge swath of forest in Indonesian Borneo slated for clearing by 'sustainable' company. Mongabay Environmental News, https://bit.ly/3GBhBqe
64. Ecositrop Website, Ecology and Conservation Center for Tropical Studies, https://bit.ly/3HOqxdz
65. SPOTT.org, https://bit.ly/3JbJzdM
66. Forest Stewardship Council. Info.fsc.org. (2022). Retrieved 7 February 2022, https://bit.ly/3320Jez
67. PT. Suka Jaya Makmur website (2022), https://bit.ly/3B0nvAd
68. International Tropical Peatlands Center. Tsuyoshi Kato - International Tropical Peatlands Center, https://bit.ly/3B58aOP
69. Pahlevi, A., 2020. Meninjau Lebih Dekat Pendekatan Lansekap untuk Kelestarian Gambut dan Hutan Kalbar. Mongabay Environmental News, https://bit.ly/3uqMjQC
70. APP Sinarmas Website. PT. Asia Tani Persada - Sustainability Dashboard, https://bit.ly/3HzIn3K
71. PT. Daya Tani Kalbar - Sustainability Dashboard. Sustainability-dashboard.com, https://bit.ly/34s4c6O

aid environment